

# **PENDIDIKAN DASAR BINTARA YANG TERINTEGRASI GUNA MEWUJUDKAN SINERGI TNI (AD) DAN POLRI**

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1. Umum.**

a. Reformasi nasional Indonesia yang didorong oleh semangat bangsa Indonesia untuk menata kehidupan dan masa depan bangsa yang lebih baik telah menghasilkan perubahan mendasar dalam sistem ketatanegaraan dan kenegaraan. Perubahan tersebut telah ditindaklanjuti antara lain melalui penataan kelembagaan sesuai dengan perkembangan lingkungan dan tuntutan tugas ke depan. Perubahan pada sistem kenegaraan berimplikasi pula terhadap pemisahan TNI dan Polri dari ABRI yang dituangkan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan TNI dan Polri serta Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Peran Polri.<sup>1</sup> Seiring dengan proses demokratisasi dan globalisasi, serta menghadapi tuntutan tugas masa depan sebagai bhayangkari negara, mengharuskan peningkatan kinerja dan profesionalisme TNI dan Polri melalui pendidikan. Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 29 ayat (1) dan (2) bahwa pendidikan kedinasan merupakan pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh

---

<sup>1</sup> Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.

departemen atau lembaga pemerintah non departemen yang berfungsi meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam pelaksanaan tugas kedinasan bagi pegawai dan calon pegawai negeri suatu departemen atau lembaga pemerintah non departemen. Oleh karena itu, pendidikan TNI dan Polri sebagai bagian dari Sisdiknas merupakan pendidikan kedinasan yang mendukung profesi kemiliteran dan profesi penegakan hukum sehingga pendidikan TNI dan Polri harus selalu terkait dengan proyeksi penugasan selanjutnya.

b. Pendidikan di lingkungan TNI dan Polri mempunyai peranan dalam membentuk postur prajurit dan anggota kepolisian. Pendidikan untuk membentuk warga negara yang memenuhi syarat dan terpilih menjadi Perwira, Bintara dan Tamtama ditempuh melalui pendidikan pertama untuk TNI dan pendidikan pembentukan bagi Polri dengan tujuan agar memiliki sikap mental dan kepribadian, pengetahuan dan keterampilan serta kesamaptaaan jasmani untuk melaksanakan tugas sebagai prajurit dan anggota kepolisian. TNI dan Polri sebagai aparatur negara harus dilandasi dengan semangat kebersamaan, kekompakan, rasa setiakawan, senasib dan seperjuangan. Namun kenyataannya, berdasarkan data Pusat Studi Politik dan Keamanan Unpad, pasca reformasi tahun 1999 sampai dengan 2015 telah terjadi konflik antara TNI dengan Polri yang mengakibatkan korban jiwa setidaknya 253 orang dan 208 unit materiil rusak.<sup>2</sup> Diantaranya konflik antara TNI dan Polri dalam kasus pembakaran Mapolres Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan pada tanggal 7 Maret 2013 dan konflik anggota Yonif 134 Tuah Sakti dengan Brimob Polda Kepulauan Riau pada tanggal 19 November 2014.<sup>3</sup> Konflik antara TNI dan Polri selama ini diantaranya disebabkan semangat *esprit de*

---

<sup>2</sup> Arum Widyarini, 2016, Konflik TNI-Polri Pasca Reformasi Tahun 1999-2015, UGM Yogyakarta.

<sup>3</sup> <http://news.liputan6.com/read/2138129/tni-29-anggota-yonif-134-diduga-terlibat-penyerangan-mako-brimob>

*corps* (jiwa korsa) yang keliru, arogansi, dan lain-lain. Beberapa langkah strategis telah dijalankan demi memutus mata rantai konflik antara TNI dan Polri diantaranya melalui pendidikan integrasi taruna Akademi TNI dan Akademi Kepolisian Indonesia untuk membangun kebersamaan TNI serta Polri. Namun hal ini belum dapat menyelesaikan konflik secara tuntas pada tataran bawah. Ketua Presidium *Indonesian Police Watch* (IPW) Neta S. Pane memberikan pernyataan bahwa “Akibatnya bentrokan antar jajaran bawah TNI dan Polri tetap saja terjadi. Anehnya lagi, akibat banyaknya bentrokan TNI dan Polri, sistem pendidikan TNI dan Polri di tingkat akademi disatukan. Padahal yang bentrok selama ini tidak pernah menyangkut kalangan atas atau alumni akademi. Yang bentrok hanyalah jajaran bawah”.<sup>4</sup> Oleh karena itu, pendidikan integrasi juga harus dilakukan di lembaga pendidikan pada tataran pendidikan tingkat bawah.

c. Beragam kasus konflik antara anggota TNI dan Polri merupakan gambaran fenomena gunung es, yang mana di permukaan intensitasnya terlihat sangat kecil tetapi di bawahnya tersimpan banyak potensi konflik yang sewaktu-waktu dapat meledak. Menyikapi fenomena di atas, Seskoad berupaya untuk mengkaji lebih mendalam tentang “pentingnya pendidikan dasar Ba yang terintegrasi guna mewujudkan sinergi TNI (AD) dan Polri” dalam membangun semangat kebersamaan, kekompakan, rasa setiakawan, senasib dan seperjuangan dalam melaksanakan tugas pokoknya masing-masing. Dengan integrasi pendidikan pada materi-materi tertentu diharapkan tercapai kebersamaan pada tataran bawah khususnya pendidikan Bintara.

---

<sup>4</sup> <http://www.beritasatu.com/hukum/303169-ipw-3-sebab-mengapa-polisi-dan-tni-kerap-bentrokan.html>

## 2. **Maksud dan Tujuan.**

a. **Maksud.** Memberikan gambaran tentang kajian pendidikan dasar Ba yang terintegrasi guna mewujudkan sinergi TNI (AD) dan Polri.

b. **Tujuan.** Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pimpinan TNI AD dalam menentukan kebijakan di bidang pendidikan, khususnya pendidikan dasar Ba yang terintegrasi guna mewujudkan sinergi TNI (AD) dan Polri, dalam rangka membangun semangat kebersamaan, kekompakan, rasa setiakawan, senasib dan seperjuangan dalam melaksanakan tugas pokoknya masing-masing.

3. **Ruang Lingkup dan Tata Urut.** Ruang lingkup pembahasan kajian ini meliputi latar belakang pemikiran, data dan fakta, selanjutnya dianalisa tentang pentingnya pendidikan dasar Bintara yang terintegrasi guna mewujudkan sinergi TNI (AD) dan Polri. Kajian ini disusun dengan tata urut sebagai berikut :

- a. Pendahuluan
- b. Latar Belakang Pemikiran.
- c. Data dan Fakta.
- d. Analisa.
- e. Penutup.

## 4. **Metode dan Pendekatan.**

a. **Metode.** Kajian ini dibuat dengan menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu dengan menganalisa data dan fakta yang ada dihadapkan dengan kondisi nyata.

b. **Pendekatan.** Pendekatan dalam kajian ini menggunakan pendekatan kepustakaan, pengumpulan data dan fakta dari berbagai sumber referensi dihadapkan dengan pentingnya pendidikan dasar Ba yang terintegrasi guna mewujudkan sinergi TNI (AD) dan Polri.

## 5. Pengertian.

- a. **Sinergi.** Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sinergi adalah kegiatan atau operasi gabungan.<sup>5</sup>
- b. **Integrasi.** *Integration is " the process of bringing together culturally and socially discrete groups into a single territorial unit and the establishment of national identity "*<sup>6</sup> (integrasi adalah "proses menyatukan kelompok-kelompok budaya dan sosial yang berbeda-beda menjadi satu kesatuan teritorial dan pembentukan identitas nasional").
- c. **Pendidikan.** Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan diartikan sebagai proses pembelajaran bagi individu untuk mencapai pengetahuan dan pemahaman yang lebih tinggi mengenai obyek-obyek tertentu dan spesifik. Pengetahuan tersebut diperoleh secara formal yang berakibat individu mempunyai pola pikir dan perilaku sesuai dengan pendidikan yang telah diperolehnya.<sup>7</sup>
- d. **Pendidikan Pertama (Dikma).** Pendidikan Pertama Prajurit TNI AD yaitu pendidikan untuk membentuk warga negara yang memenuhi syarat dan terpilih untuk menjadi Perwira, Bintara dan Tamtama yang ditempuh melalui Pendidikan Dasar Keprajuritan (Diksarit), Pendidikan Dasar Golongan (Diksargol), dan Pendidikan Dasar Golongan Lanjutan (Diksargolan) agar memiliki sikap mental dan kepribadian, intelektual, serta kesamaptaan jasmani yang sesuai dengan peranan dan golongan/strata sebagai Prajurit TNI AD.<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup> <https://kbbi.web.id/sinergi>

<sup>6</sup> Myron Weiner, 1971. *Asian Survey, The 1971 Elections and the Indian Party System*, University of California Press. 242

<sup>7</sup> <https://kbbi.web.id/pendidikan>

<sup>8</sup> Surat Keputusan Kasad Nomor Skep/383/X/2002 tanggal 31 Oktober 2002 tentang Bujukin tentang Pendidikan

e. **Pendidikan Pertama Bintara (Dikmaba) TNI AD.**  
Pendidikan untuk membentuk warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dan terpilih untuk menjadi Bintara TNI AD pada suku Prajurit Karier.<sup>9</sup>

f. **Pendidikan Pembentukan Bintara (Diktukba) Polisi.**  
Pendidikan Pembentukan yang selanjutnya disingkat Diktuk adalah pendidikan yang membentuk dan membekali peserta didik menjadi pegawai negeri pada Polri.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup>*Ibid*

<sup>10</sup>Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Sistem Pendidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

## **BAB II**

### **LATAR BELAKANG PEMIKIRAN**

6. **Umum.** Penyelenggaraan pendidikan sebagai suatu rangkaian kegiatan pendidikan di lingkungan TNI AD dan Polri merupakan pilar utama pembentukan dan pengembangan profesionalitas. Pendidikan merupakan usaha agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran dan/atau cara lain yang dikenal dan diakui oleh masyarakat. Gerakan reformasi di Indonesia secara umum menuntut diterapkannya prinsip demokrasi, desentralisasi, keadilan, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam hubungannya dengan pendidikan, prinsip-prinsip tersebut akan memberikan dampak yang mendasar pada kandungan, proses, dan manajemen sistem pendidikan. Selain itu, ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat dan memunculkan tuntutan baru dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam sistem pendidikan. Tuntutan tersebut menyangkut pembaharuan sistem pendidikan, diantaranya pembaharuan kurikulum, yaitu diversifikasi kurikulum untuk melayani peserta didik, diversifikasi jenis pendidikan yang dilakukan secara profesional, penyusunan standar kompetensi lulusan guna terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Penyelenggaraan pendidikan integrasi berpedoman kepada landasan operasional sebagai payung hukum yang dapat dipahami oleh semua pihak terkait. Selain itu, pada pembahasan kajian pendidikan dasar Ba yang terintegrasi guna mewujudkan sinergi TNI (AD) dan Polri perlu didukung dengan teori-teori yang relevan, sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

## 7. Landasan Pemikiran.

a. **Landasan Idiil.** Pancasila sebagai landasan Idiil adalah falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia yang mengandung nilai-nilai dasar dan cita-cita luhur serta tujuan yang hendak dicapai bangsa Indonesia. Di tengah kondisi semakin melemahnya tali perekat rasa kebangsaan maupun semangat nasionalisme dan persatuan bangsa Indonesia, saat ini mulai timbul kesadaran di seluruh lapisan masyarakat untuk kembali mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ini menunjukkan bahwa Pancasila masih memiliki arti penting bagi bangsa Indonesia sebagai dasar negara, ideologi negara, falsafah hidup dan alat pemersatu bangsa di tengah arus globalisasi. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sila kelima butir-1 yaitu mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan menjadi landasan bagi TNI dan Polri dalam mewujudkan sinergi di lembaga pendidikan.

b. **Landasan Konstitusional.** Keutuhan dan kedaulatan NKRI tidak terlepas dari sistem nasional seperti telah digariskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan sumber hukum tertinggi di Indonesia. Pada pasal 30 ayat (2) menegaskan bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh TNI dan Polri sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung<sup>11</sup>. Selain itu pada pasal 30 ayat (4) bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.<sup>12</sup> Berdasarkan pasal-pasal tersebut di atas menunjukkan bahwa perlu adanya

---

<sup>11</sup>Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>12</sup>*Ibid*



sinergi TNI dan Polri dalam mewujudkan usaha pertahanan negara dan keamanan negara.

c. **Landasan Visional.** Wawasan Nusantara sebagai Landasan Visional merupakan cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah, kesatuan ekonomi, sosial budaya maupun pertahanan keamanan dalam perwujudannya sebagai satu kesatuan politik. Landasan ini menegaskan bahwa dalam memandang Negara Kesatuan Republik Indonesia, harus meliputi seluruh potensi baik masyarakat, alam, kondisi sosial dengan keutuhan wilayah. TNI sebagai salah satu komponen bangsa, memiliki kewajiban moral untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian Wawasan Nusantara menjadi landasan dalam pendidikan dasar Ba yang terintegrasi guna mewujudkan sinergi TNI (AD) dan Polri.

d. **Landasan Konsepsional.** Ketahanan Nasional adalah tingkat keuletan dan ketangguhan bangsa Indonesia dalam menghimpun dan menggerakkan seluruh kemampuan dan mengembangkan kekuatan nasional. Faktor-faktor tersebut merupakan kekuatan nasional yang harus dipersiapkan dan dibangun sehingga menghasilkan suatu kondisi yang dinamis dan kondusif dalam mewujudkan daya tangkal bangsa. Hal ini akan menghasilkan kemampuan dan kesanggupan menghadapi segala ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan baik yang datang dari luar maupun dari dalam, guna mencapai tujuan nasional. Konsepsi ini menjadi pedoman strategi pendidikan dasar Ba yang terintegrasi guna mewujudkan sinergi TNI (AD) dan Polri.

e. **Landasan Hukum.**

- 1) Ketetapan MPR RI Nomor VI/MPR/2000 tentang pemisahan TNI dan Polri. Melalui Tap MPR ini, secara kelembagaan TNI dan Polri dipisahkan. TNI merupakan alat negara yang berperan dalam pertahanan negara sedangkan Polri merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan. Dalam hal ini terdapat keterkaitan kegiatan pertahanan dan kegiatan keamanan, TNI dan Polri harus bekerja sama dan saling membantu.<sup>13</sup>
- 2) Ketetapan MPR RI Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Peran Polri. Dalam Tap MPR ini dijelaskan bahwa TNI merupakan alat negara yang berperan dalam pertahanan negara memiliki tugas pokok menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Sedangkan Polri merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam rangka menjalankan tugasnya maka kedua institusi wajib untuk saling bantu yang diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Dalam Pasal 7 disebutkan bahwa tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

---

<sup>13</sup>Ketetapan MPR RI Nomor VI/MPR/2000 tentang pemisahan TNI dan Polri, Pasal 2 ayat (3).

yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, dan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Tugas pokok tersebut dilakukan dengan Operasi Militer Perang (OMP) maupun Operasi Militer Selain Perang (OMSP), dalam bentuk membantu Polri dalam rangka tugas Kamtibmas yang diatur dalam undang-undang.

4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Dalam Pasal 13 disebutkan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

8. **Nawacita.** Nawacita adalah istilah umum yang diserap dari bahasa Sansekerta, *nawa* (sembilan) dan *cita* (harapan, agenda, keinginan). Dalam visi-misi tersebut dipaparkan sembilan agenda pokok untuk melanjutkan semangat perjuangan dan cita-cita Soekarno yang dikenal dengan istilah Trisakti, yakni berdaulat secara politik, mandiri dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.<sup>14</sup> Berikut inti dari konsep Nawacita :

a. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, melalui politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya dan pembangunan pertahanan negara Tri Matra terpadu yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.

---

<sup>14</sup> <https://nasional.kompas.com/read/2014/05/21/0754454/.Nawa.Cita.9.Agenda.Prioritas.Jokowi-JK>

- b. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, dengan memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publik pada institusi-institusi demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu, dan lembaga perwakilan.
- c. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
- d. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
- e. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program "Indonesia Pintar"; serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program "Indonesia Kerja" dan "Indonesia Sejahtera" dengan mendorong *land reform* dan program kepemilikan tanah seluas 9 hektar, program rumah kampung deret atau rumah susun murah yang disubsidi serta jaminan sosial untuk rakyat di tahun 2019.
- f. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
- g. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
- h. Melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan, yang menempatkan secara proporsional aspek pendidikan, seperti pengajaran sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotisme dan cinta Tanah Air, semangat bela negara dan budi pekerti di dalam kurikulum pendidikan Indonesia.

- i. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui kebijakan memperkuat pendidikan kebhinekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antar warga.

## 9. Landasan Teori.

### a. Sinergi.

- 1) Menurut Stephen Covey dalam bukunya *The Seven Habits of Highly Effective People*, bahwa:<sup>15</sup>

*“Synergy is what happens when one plus one equals ten or a hundred or even a thousand! It’s the profound result when two or more respectful human beings determine to go beyond their preconceived ideas to meet a great challenge”.*

Bahwa sinergi adalah apa yang terjadi ketika satu tambah satu sama dengan sepuluh atau seratus atau bahkan seribu. Sinergi adalah sebuah hasil yang baik ketika dua manusia terhormat atau lebih melewati prasangka mereka untuk menghadapi sebuah tantangan yang besar.

Dari pengertian tersebut, maka sinergi adalah kerjasama yang dilakukan untuk mencapai hasil yang lebih besar.

- 2) Teori sinergi menurut A.F. Stones James dalam Soekanto (2009:212-213) adalah bahwa hubungan antara dua pihak dapat menghasilkan tingkatan komunikasi dihadapkan pada elemen kerja sama dan kepercayaan. Pola hubungan kerja yang menghasilkan tiga sifat komunikasi dalam kerja sama tersebut sebagai berikut :<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> <https://www.gramedia.com/products/the-7-habits-of-highly-effective-people>

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, 2009, Peranan Sosiologi Suatu Pengantar, Edisi Baru, Rajawali Pers, Jakarta.

- a) *Defensive*. Tingkat kerja sama dan kepercayaan rendah akan mengakibatkan pola komunikasi yang bersifat pasif defensif.
- b) *Respectful*. Kerja sama yang tinggi dan saling mempercayai akan menghasilkan pola komunikasi yang bersifat kompromi dan saling menghargai.
- c) *Sinergy*. Dengan kerja sama yang tinggi dan saling mempercayai akan menghasilkan pola komunikasi yang bersifat sinergitas yang berarti kerja sama yang terjalin akan menghasilkan keluaran yang lebih besar dari penjumlahan hasil keluaran masing-masing pihak (*the whole greater than the sum of its parts*). Teori ini relevan dalam mempererat kerjasama guna mewujudkan sinergi lintas sektoral antara TNI/TNI AD dengan Polri, terutama dalam bidang pendidikan.

b. **Pendidikan.**

- 1) Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan diartikan sebagai proses pembelajaran bagi individu untuk mencapai pengetahuan dan pemahaman yang lebih tinggi mengenai obyek-obyek tertentu dan spesifik. Pengetahuan tersebut diperoleh secara formal yang berakibat individu mempunyai pola pikir dan perilaku sesuai dengan pendidikan yang telah diperolehnya.
- 2) Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan

spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

3) Menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan merupakan proses pembudayaan yakni suatu usaha memberikan nilai-nilai luhur kepada generasi baru dalam masyarakat yang tidak hanya bersifat pemeliharaan tetapi juga dengan maksud memajukan serta memperkembangkan kebudayaan menuju ke arah keluhuran hidup kemanusiaan.<sup>17</sup>

Dari beberapa definisi pendidikan tersebut, maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa pendidikan adalah suatu proses pembelajaran kepada peserta didik untuk meningkatkan dan mengembangkan potensi dirinya menjadi lebih baik.

c. **Kurikulum Terintegrasi.** Menurut Robin Fogarty, model kurikulum terintegrasi dikelompokkan menjadi 3 (tiga) klasifikasi pengintegrasian kurikulum, sebagai berikut :<sup>18</sup>

1) Pengintegrasian di dalam satu disiplin ilmu. Model ini merupakan integrasi yang mentautkan dua atau lebih bidang ilmu yang serumpun. Misalnya di bidang ilmu alam, mentautkan antara dua tema dalam fisika dan biologi yang memiliki relevansi, atau antara tema dalam kimia dan fisika. Contoh tema metabolisme dapat ditinjau dari biologi maupun kimia. Begitupun dengan tema-tema yang relevan pada ilmu sosial seperti sosiografi dan geografi. Jadi sifat perpaduan dalam model ini hanya dalam satu rumpun bidang ilmu saja (*inter disipliner*).

---

<sup>17</sup> Dewantara, Ki Hadjar, 1954. Masalah Kebudayaan. Pertjetakan Taman Siswa, Jogjakarta.

<sup>18</sup> Trianto, 2007, Model Pembelajaran Terpadu dalam Teori dan Praktek, Prestasi Pustaka, Jakarta.

2) Pengintegrasian beberapa disiplin ilmu. Model ini merupakan integrasi yang mentautkan antar disiplin ilmu yang berbeda. Misalnya antara tema yang ada dalam bidang ilmu sosial dengan bidang ilmu alam. Sebagai contoh, tema energi merupakan tema yang dapat dikaji dari bidang ilmu yang berbeda baik dalam bidang ilmu sosial (tentang kebutuhan energi dalam masyarakat), dan bidang ilmu alam (tentang bentuk-bentuk energi dan teknologinya).

3) Pengintegrasian di dalam satu dan beberapa disiplin ilmu. Model ini merupakan integrasi yang paling kompleks karena mentautkan antar disiplin ilmu yang serumpun sekaligus bidang ilmu yang berbeda. Misalnya antara tema yang ada dalam bidang ilmu sosial, bidang ilmu alam, teknologi maupun ilmu agama. Sebagai contoh, tema rokok merupakan tema yang dapat dikaji dari berbagai bidang ilmu yang berbeda.

Teori ini dapat menjadi landasan dalam mengintegrasikan kurikulum pendidikan Bintara TNI dan Polri, sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

d. **Profesionalisme Militer.** Menurut Samuel P. Huntington keahlian yang spesifik bukan satu-satunya kriteria yang harus dimiliki oleh seorang profesional. Memang kriteria itu mutlak karena berkenaan dengan “bagaimana” pekerjaan itu dilaksanakan, namun ada kriteria yang tidak kalah penting adalah bahwa seorang profesional harus memiliki tanggung jawab sosial memiliki standar etika dan kinerja yang secara langsung menjadi rambu-rambu yang memberi batas dan arah mengenai “untuk apa” pekerjaan itu dilaksanakan, dan bilamana pekerjaan itu harus, boleh atau tidak boleh dilakukan.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Effendy, Muhadjir, 2009, Jati Diri Dan Profesi TNI, UMM Press Malang.



1) Keahlian. Sebuah kemampuan militer yang dimiliki lewat masa pendidikan dalam hal mendukung proses pelaksanaan tugas berupa organisir, perencanaan dan kemampuan dasar militer.

2) Tanggung jawab sosial yang khusus. Harus memiliki tanggung jawab akan apa yang dilakukan dan mengetahui yang mana tugas yang bertentangan dengan rakyat yang mana yang memiliki peran positif terhadap masyarakat.

3) Karakter korporasi (*corporate character*) yang melahirkan rasa *esprit de corps* yang kuat. Sebuah tradisi bahwa militer adalah lembaga birokrasi milik negara yang memiliki aturan-aturan khusus dan memiliki doktrin khusus pada setiap anggotanya. Selain itu memiliki pedoman khusus dalam pelaksanaan tugas. Artinya lembaga TNI sudah memiliki kemandirian dalam birokrasi, lembaga pendidikan, jurnal, asosiasi, kebiasaan, dan tradisi.

Oleh karena pendidikan merupakan pilar dalam menyiapkan sumber daya manusia yang mempunyai peran dan fungsi sangat menentukan dalam membentuk dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia prajurit agar memiliki kriteria profesional.

e. **Profesionalisme Polri.** Pemisahan Polri dan TNI/ABRI sejak tanggal 1 April 1999, merupakan momentum yang dipandang sebagai sebuah awal (*starting point*) untuk kehidupan Polri sebagai *civil society*. Momentum ini juga dipandang sebagai "*timing*" yang baik untuk mewujudkan Profesionalisme Polri. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, profesionalisme berasal dari kata dasar profesi yang berarti sebagai pekerjaan dengan pendidikan dan keahlian tertentu yang memerlukan kepandaian khusus dengan sistem penggajian

terstruktur. Sedangkan menurut Albert J. Reiss Jr, *“a profession will be anxious to create and enforce standards of conduct for its members to make the profession attractive to potential clients. In a situation where client interests are different from the interests of the profession, it is unrealistic to expect the same impartial internal control.”*<sup>20</sup> Profesi pada dasarnya memiliki karakteristik yang tidak cukup dicerminkan melalui penguasaan pengetahuan, akan tetapi juga dipengaruhi pada hubungan pelaku profesi dan kliennya yang merupakan konsep inti (*core conception*) suatu profesi. Perumusan strategi pelaksanaan standarisasi profesionalisme Polri, dimaksudkan untuk memenuhi harapan masyarakat yang membutuhkan polisi yang lemah lembut dalam pelayanan dan tegas dalam penegakkan hukum. Ketentuan tentang profesionalisme Polri tercantum dalam UU Nomor 2 tahun 2002 tentang Polri, pasal 34 yaitu :

- 1) Sikap dan perilaku Polri terikat kode etik Profesi Polri.
- 2) Kode etik profesi Polri dapat menjadi pedoman bagi pengemban fungsi kepolisian lainnya dalam melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dilingkungannya.
- 3) Ketentuan tentang Kode Etik Profesi lebih lanjut diatur dengan keputusan Polri.

Kode Etik Profesi Polri (KEPP) itu sendiri adalah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis yang berkaitan dengan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, patut, atau tidak patut dilakukan oleh Anggota Polri dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawab jabatan.

---

<sup>20</sup>Albert J. Reiss Jr, 1971. *The police and the public*, New Haven, Yale University Press.127

10. **Dasar Pemikiran.** Tuntutan perubahan di berbagai bidang kehidupan masyarakat, telah dimulai sejak bergulirnya era reformasi pada tahun 1998. Berbagai perubahan tersebut dilandasi oleh keinginan sebagian besar masyarakat untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih demokratis serta peningkatan kesejahteraan rakyat yang didasarkan pada nilai-nilai dasar sebagaimana tertuang di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sejalan dengan perkembangan reformasi di bidang politik, ekonomi dan hukum, pemerintah juga memiliki komitmen untuk melakukan reformasi di bidang birokrasi. Pelaksanaan reformasi birokrasi di masing-masing instansi pemerintah dilakukan berdasarkan kebijakan/program/kegiatan yang telah digariskan dalam *Grand Design* Reformasi Birokrasi dan *Roadmap* Reformasi Birokrasi serta berbagai pedoman pelaksanaannya. Reformasi tersebut telah ditindaklanjuti dengan pemisahan TNI dan Polri dari ABRI yang dituangkan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan TNI dan Polri serta Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Peran Polri. Akibat pemisahan tersebut, sering terjadi konflik antara TNI dan Polri, terutama di kalangan prajurit tingkat bawah. Akar masalahnya menyentuh masalah kultural, diantaranya faktor psikologis kultural anggota TNI belum terlepas dari perasaan superioritas masa lalu sebagai saudara tua ketika Polri masih tergabung dalam ABRI. Sebaliknya, di kalangan Polri tumbuh sikap *overacting*, euforia kewenangan, arogansi, sebagai ekses pemisahannya dari ABRI serta diberlakukannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memberikan kewenangan amat luas dalam fungsi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas). Di sisi lain, kebanggaan korps yang berlebihan, sehingga satu sama lain merasa lebih hebat. Selanjutnya masalah regulasi TAP MPR Nomor VI dan VII Tahun 2000 yang lahir di tengah euforia reformasi telah memisahkan secara fungsi pertahanan keamanan

(Hankam) yang mengakibatkan tidak terpadunya penanganan suatu masalah. Fungsi keamanan mutlak diemban Polri, fungsi pertahanan jadi ranah TNI dengan penekanan hanya untuk menghadapi ancaman militer dari luar. Padahal, kenyataannya kedua fungsi bersifat *overlapping*, masalah keamanan dapat berkembang eskalatif, terkadang tak bisa diprediksi, sehingga secara cepat memasuki ranah pertahanan karena telah mengancam kedaulatan, keselamatan bangsa dan keamanan negara.

Berbagai solusi telah dilakukan dalam mengatasi permasalahan konflik TNI dan Polri tersebut, diantaranya tindakan tegas terhadap oknum yang terlibat serta melalui pendidikan dasar integrasi antara Ba TNI AD dan Polri. Hal ini dimulai dengan menyatukan kembali pendidikan basis bersama pada tingkatan Perwira. Namun hal ini belum dapat menyentuh kepada akar permasalahan konflik yang lebih banyak melibatkan unsur prajurit di tataran tingkat bawah yang berinteraksi langsung di lapangan antar kedua institusi tersebut.

Seskoad sebagai lembaga pendidikan tertinggi TNI AD dalam menyelenggarakan pendidikan dan pengkajian strategis perlu merespon fenomena tersebut dengan konsep pentingnya pendidikan dasar Ba yang terintegrasi guna mewujudkan sinergi TNI (AD) dan Polri, karena Ba merupakan mata rantai penghubung antara Perwira dengan Tamtama dalam pelaksanaan tugas, dengan mengadopsi pola Pendidikan Dasar Integrasi Kemitraan Chandradimuka Akademi TNI dan Akpol yang menjalani pendidikan dasar keprajuritan di Resimen Chandradimuka Akademi TNI, Magelang.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena di atas, maka dapat dirumuskan masalahnya adalah “Bagaimana pendidikan dasar Ba yang terintegrasi guna mewujudkan sinergi TNI (AD) dan Polri ?”. Dari rumusan masalah tersebut, maka identifikasi masalah yang harus dijawab dalam pengkajian ini adalah :

- a. Bagaimana pola pendidikan pertama Bintara TNI AD dan Polri selama ini ?
- b. Apa urgensi dari pendidikan dasar Ba yang terintegrasi guna mewujudkan sinergi TNI (AD) dan Polri ?
- c. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi dalam pendidikan dasar Ba yang terintegrasi guna mewujudkan sinergi TNI (AD) dan Polri ?
- d. Bagaimana langkah-langkah dalam mengimplementasikan pendidikan dasar Ba yang terintegrasi guna mewujudkan sinergi TNI (AD) dan Polri ?

### **BAB III**

#### **DATA DAN FAKTA**

11. **Umum.** Era reformasi membawa banyak perubahan pada hampir segala bidang di Republik Indonesia. Suasana keterbukaan pasca pemerintahan orde baru menyebabkan arus informasi dari segala penjuru dunia niscaya tidak dapat terbendung, dan ada kecenderungan kekuasaan negara melemah didesak oleh kekuasaan ekonomi. Pasca reformasi tahun 1998 juga membawa perubahan pada organisasi Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan pemisahan kedua institusi tersebut dari ABRI. TNI melakukan beberapa perubahan dan penataan ulang di bidang doktrin dan organisasi. TNI kembali kepada jati diri sebagai tentara nasional, tentara pejuang, dan tentara profesional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Demikian juga halnya dengan Polri melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam perjalanannya masih saja terdapat beberapa permasalahan di lapangan yang terkait dengan indikator terjadinya sinergi TNI dan POLRI yaitu masih adanya konflik antara oknum TNI dan Polri. Contoh :

12. **Persoalan-Persoalan Dalam Mewujudkan Sinergi TNI dan Polri.** Beberapa fakta yang dapat diidentifikasi menjadi persoalan-persoalan dalam mewujudkan sinergi TNI dan POLRI selama ini adalah sebagai berikut :

a. **Masih terjadinya konflik TNI dan Polri.** Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan TNI dan Polri kemudian disusul dengan dikeluarkannya TAP Nomor VII/MPR/2000 tentang peran TNI dan Polri, yang mengatur tugas Polri di bidang keamanan dan TNI di bidang pertahanan dari ancaman luar merupakan keputusan politik yang tepat. Namun, TAP MPR Nomor VII/MPR-RI/2000 ini justru menyebabkan terjadinya potensi konflik antara TNI dan Polri dalam menjalankan fungsi-fungsi pertahanan dan keamanan. Di sisi lain, dengan pemisahan tugas, di mana TNI hanya menangani masalah pertahanan dan Polri menangani masalah keamanan, telah menimbulkan persoalan yang kompleks di lapangan. Institusi TNI dan Polri merupakan suatu badan yang berbeda. TNI adalah suatu institusi kombatan (tempur), sedangkan Polri adalah non kombatan (non tempur). Polri hanya menangani apa yang disebut dengan *crime justice system*, atau yang lebih dikenal dengan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas).

Berdasarkan data dari berbagai sumber, beberapa catatan mengenai konflik TNI dan Polri pada 2010 s.d. 2017 telah terjadi beberapa kasus, diantaranya seperti yang tertera dalam tabel berikut:

NO.	TEMPAT DAN WAKTU	KASUS	KET
1	2	3	4
1.	Makassar, 24 November 2010	Konflik antara anggota Polresta Makassar dengan anggota Yonkav 10/Serbu Kodam VII/Wrb	
2.	Gorontalo, 12 April 2012	Konflik antara anggota Brimob Polda Gorontalo dengan anggota Yonif 221 Kostrad(alih Kodal ke Kodam VII/Wrb tahun 2012 menjadi Yonif 715/Motuli'ato)	

1	2	3	4
3.	OKU, 7 Maret 2013	Penyerangan Mapolres OKU oleh anggota Yonarmed 15/76 Tarik Kodam II/Swj	
4.	Depok, 18 Oktober 2013	Konflik antara anggota Brimob Sat Gegana dengan anggota Madivif 1 Kostrad	
5.	Karawang, 19 Oktober 2013	Konflik Yonif Linud 305/17/1 Kostrad dengan anggota Brimob Den B Polda Jabar	
6.	Palu, 13 Desember 2013	Bentrokan antara anggota Yonif 714/SM dengan anggota Polres Palu	
7.	Kwitang, 28 Desember 2013	Penyerangan Markas Brimob Densus A Polda Metro Jaya oleh anggota TNI	
8.	Cipanas, 7 Agustus 2014	Konflik anggota Yonarmed 5/105 Tarik Kodam III/Slw dengan Brimob Polda Jabar Cipanas	
9.	Batam, 21 September 2014	Konflik anggota Yonif 134/Tuah Sakti Kodam I/BB dengan anggota Brimob Polda Kepri	
10.	Batam, 19 November 2014	Penyerangan barak Teratai Satuan Brimob Polda Kepri oleh anggota Yonif 134/Tuah Sakti Kodam I/BB	
11.	Binjai, 20 November 2014	Penusukan anggota Brimob Den C Polda Sumut oleh anggota TNI	
12.	Gowa, 2 Juli 2015	Konflik anggota Brigif L-3/1 Kostrad dengan anggota Brimob Polda Sulselbar	
13.	Semarang, 12 Juli 2015	Konflik anggota Brimob Polda Jateng dengan anggota Penerbad	



1	2	3	4
14.	Jakarta, 1 Maret 2016	Konflik antara anggota Koarmabar TNI AL dengan anggota Polres Metro Jakarta Timur	
15.	Manokwari, 30 Juni 2016	Konflik anggota Kompi C/D Batalyon 752 dengan anggota Brimob Polda Papua Barat.	
16.	Medan, 27 April 2017	Bentrok antara anggota Arhanud 11 Kodam I/BB dengan anggota Polres Simalungun	
17.	Pekanbaru, 10 Agustus 2017	Bentrok antara anggota Korem 031 Kodam I/BB dengan anggota Satlantas Polresta Pekanbaru	

Diolah dari berbagai sumber (2018).

Dari data tersebut, terlihat bahwa seluruh konflik TNI dan Polri terjadi pada jajaran prajurit tingkat bawah. Bahkan penyelenggaraan pendidikan terintegrasi yang telah dilaksanakan secara bersama antara Akademi TNI dan Akpol, belum mampu menghindari konflik yang terjadi. Karena, langkah ini hanya untuk pendidikan di jajaran Perwira, belum menyentuh pada tataran pendidikan tingkat bawah. Sementara konflik TNI dan Polri yang terjadi selama ini terjadi di kalangan prajurit tingkat bawah. Hal ini selaras dengan pernyataan Ketua Presidium *Indonesian Police Watch* (IPW) Neta S. Pane bahwa “Akibatnya bentrokan antar jajaran bawah TNI dan Polri tetap saja terjadi. Anehnya lagi, akibat banyaknya bentrokan TNI dan Polri, sistem pendidikan TNI dan Polri di tingkat akademi disatukan. Padahal yang bentrok selama ini tidak pernah menyangkut kalangan atas atau alumni akademi. Yang bentrok hanyalah jajaran bawah”. Dengan demikian, pendidikan integrasi juga harus dilakukan di lembaga pendidikan pada tataran pendidikan tingkat bawah.

b. **Perbedaan Doktrin TNI dan Polri.** Doktrin merupakan hasil refleksi kritis yang akan berdampak menyeluruh dan sistemik ke berbagai doktrin turunannya.<sup>21</sup> Sebagai pedoman dasar, doktrin memiliki kegunaan dalam membangun dan mengembangkan postur TNI AD yang dapat diandalkan sebagai komponen utama dalam sistem pertahanan negara. Doktrin bukanlah seperangkat aturan-aturan yang penerapannya tanpa memerlukan pemikiran, melainkan merupakan suatu kerangka kerja untuk memahami hakekat peran, tugas dan fungsi organisasi. Tujuannya adalah untuk membimbing, menjelaskan dan mengajarkan, serta menyediakan dasar untuk diskusi dan studi lebih lanjut. Lebih lanjut, antara doktrin TNI dan Polri masih ada persoalan, sehingga sinergi antara kedua institusi tersebut tidak dapat serta merta dilaksanakan, karena perbedaan doktrin tersebut. Salah satu sebab, yaitu belum adanya regulasi yang dapat memayungi implementasi sinergitas TNI dan Polri ditinjau dari tataran strategis. Yang dengan sendirinya telah menghadirkan keraguan satuan pelaksana di daerah dalam pelaksanaan tugas perbantuan kepada Polri, maupun sebaliknya. Pasca reformasi kedua institusi ini dituntut untuk menjalankan peran dan fungsinya masing-masing. Pelembagaan politik kebangsaan dalam konteks demokrasi kemudian diterjemahkan dengan memisahkan secara tegas. Ada irisan antara himpunan tugas keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) yang diemban oleh Polri dengan Tugas Pokok Operasi Militer Selain Perang (OMSP) yang diatur dalam UU No 34 tahun 2004 tentang TNI. Pembahasan RUU Kamnas, sebagai payung hukum bagi koordinasi, batasan, hingga operasi di lapangan bagi kedua institusi masih menuai hambatan. Latar belakang diusulkannya RUU Kamnas sejatinya merupakan respon dari ketidakselarasan perundang-undangan yang dapat

---

<sup>21</sup> Doktrin TNI AD (Kartika Eka Paksi), Seskoad - 2017. Hlm.9

menjadi payung hukum bagi institusi pengelola keamanan. Keberadaan UU No 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dianggap tidak lagi dapat menaungi berbagai bentuk ancaman, baik dari dalam negeri maupun luar negeri serta koordinasi antar kelembagaan. Dalam UU Pertahanan Negara, lebih banyak mengatur esensi dari tugas TNI dengan sedikit 'hiasan' tugas perbantuan TNI kepada Kamtibmas yang diemban Polri. Sementara keberadaan Polri dengan UU No 2 Tahun 2002 merasa sudah cukup dengan kemandirian dan profesionalisme selepas pemisahan dengan TNI (ABRI), menjadikan lembaga pengelola Kamtibmas terposisikan dominan. Dengan kedudukan langsung dibawah Presiden, lembaga pengelola keamanan memposisikan dirinya sebagai lembaga kebijakan dan operasional sekaligus, suatu kondisi yang kurang tepat bagi tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Definisi sederhana sektor keamanan (*security sector*) dalam alam reformasi adalah seluruh organisasi yang mempunyai otoritas untuk menggunakan atau menggerakkan penggunaan fisik atau ancaman penggunaan kekerasan fisik dalam rangka melindungi negara dan warga-negara, termasuk adanya institusi (sipil) yang memiliki kewenangan mengawasinya. Berdasarkan definisi itu dapat kita tegaskan bahwa tujuan perbaikan dan pembenahan sektor keamanan (*security sector reform*) adalah transformasi institusi-institusi keamanan sehingga dapat menjalankan perannya secara efektif, *legitimate* dan bertanggungjawab. Contoh dari perbedaan doktrin TNI dan Polri tersebut, yaitu sebagaimana tercantum dalam "UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI dan UU Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, tidak memberikan penjelasan dan ruang diskresi atas TNI dan Polri dalam melaksanakan tugasnya berkaitan dengan tugas perbantuan melalui panduan setingkat MoU". Dilain sisi, Rancangan

Undang-Undang Keamanan Nasional, masih terdapat pro-kontra, kelompok yang pro berpandangan bahwa TNI memiliki kemampuan baik secara sistem maupun gelar kekuatan, yang dapat digunakan dan dikerahkan di manapun kapanpun tanpa harus dihadapkan pada kerumitan birokrasi. Kelima sistem itu adalah sistem persenjataan, telekomunikasi, transportasi, medis, dan logistik. Sedangkan mereka yang kontra memiliki penilaian RUU tersebut akan mengurangi kewenangan Polri dalam menjaga keamanan karena sebagian kewenangan itu dilimpahkan ke tentara. Padahal, doktrin dan proses pendidikan anggota TNI dan Polri sangat berbeda, dengan fungsi dan peran yang berbeda pula. Hal ini yang sedikit memicu keraguan aparat di lapangan, tentang tugas yang boleh dilaksanakan ataupun tidak, serta terkait kewenangan dan batas kewenangan yang dimiliki kedua institusi tersebut, pada tataran tertentu.

c. **Aspek Psikologi.** Kondisi psikologis masyarakat sekarang atau disebut dengan masyarakat milenial (orang-orang yang lahir pada tahun 1990-an), yang diantaranya termasuk anggota TNI dan Polri (setingkat Tamtama dan Bintara) sangat dipengaruhi oleh lingkungan global, yang menyebar melalui perangkat teknologi informasi dan komunikasi (internet), dengan segala daya tariknya telah merasuk dan menjadi budaya baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini menjadi premis dasar teori hambatan perilaku, yaitu stimulasi yang berlebih atau tidak diinginkan, mendorong terjadinya arousal atau hambatan dalam kapasitas yang terbatas dalam pemrosesan informasi.<sup>22</sup> Dalam situasi yang diliputi perasaan bahwa ada sesuatu yang menghambat perilaku, orang merasa tidak nyaman dan cenderung lepas kontrol. Pengawasan yang dilakukan adalah

---

<sup>22</sup> Fisher, R. V. dan Schmincke, H. U., 1984. Pyroclastic Rocks. Berlin Heidelberg New York Tokyo : Springer-Verlag.

orang mencoba menegaskan kembali kontrol yang dimiliki dengan cara melakukan antisipasi faktor-faktor lingkungan yang membatasi kebebasan perilaku. Usaha tersebut dikatakan sebagai **reaktansi psikologis** (*psychological reactance*). Salah satu hal yang paling diingat dari terjadinya **reaktansi psikologis** (*psychological reactance*) adalah sering terjadinya gesekan antara prajurit TNI dan Polri, menunjukkan adanya usaha-usaha untuk menunjukkan dominasi dalam budaya kultur yang tidak sama namun saling terkait ini. Yang disebabkan tidak adanya / kurang kokohnya sinergi TNI dan Polri diantaranya juga karena tidak terlepas dari sejarah dimana ketika Polri masih menyatu dengan TNI "merasa terkungkung dan dianaktirikan" setelah terjadi pemisahan TNI dan Polri menjadi polisi yang mandiri, dengan segala keistimewaan dan kewenangan yang dimiliki institusi tersebut. Hal tersebut, membawa dampak psikologis kepada personel Polri yang seolah-olah menjadi superior baik dari segi tugas maupun tingkat kesejahteraan, disisi lain prajurit TNI merasa bahwa dirinya lebih hebat dari personel Polri. Aspek psikologis sejarah sebagai salah satu penghambat terwujudnya sinergi yang tulus dan ikhlas dari kedua belah pihak. Akibatnya tidak jarang terjadi bentrokan dan saling berbalas tindakan anarkhis, yang pemicu sebetulnya adalah hal yang sederhana.

### 13. **Pola Pendidikan Pertama Bintara TNI dan Bintara Polri Selama Ini.**

a. **Pola Pendidikan Pertama Bintara TNI AD.** Dalam rangka meningkatkan potensi dan kualitas prajurit, TNI AD memiliki lembaga pendidikan daerah untuk menyelenggarakan pendidikan pertama Bintara (Dikmaba) TNI AD bagi calon prajurit yaitu Resimen Induk Kodam (Rindam). Dikmaba adalah pendidikan untuk membentuk warga Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dan terpilih untuk menjadi Bintara TNI AD yang dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap, yaitu Dikmaba

TNI AD Tahap Dasar Keprajuritan dan Dikmaba TNI AD Tahap Dasar Golongan Bintara. Pembekalan yang diberikan meliputi materi pendidikan dasar keprajuritan dan dasar golongan Bintara.

Berdasarkan Kurikulum Pendidikan Pertama Bintara TNI AD Nomor :19–A2–DIKMABA TNI AD–2017 dengan pengesahan Keputusan Dankodiklat TNI AD Nomor Kep/209/IX/2017 tanggal 20 September 2017, bahwa materi pelajaran dijabarkan sebagai berikut :

NO.	MATA PELAJARAN	MP	JUMLAH JAM PELAJARAN				KET
			TAHAP DASRIT		TAHAP DASGOL		
			T	P	T	P	
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	SUBJEK BIN SIKAP DAN PERILAKU	(107)	(81)	( - )	(26)	( - )	
A.	BS Pembinaan Mental	86					
	a. SBS Bin Rohani	41					
	1) Pokok-Pokok Ajaran Agama 2) Pola Dasar Bintel TNI		36 -	- -	- 5	- -	
	b. SBS Bin Mental Ideologi	20	20				
	1) Pancasila 2) UUD 1945 3) Bhineka Tunggal Ika 4) NKRI		5 5 5 5	- - - -	- - - -	- - - -	

1	2	3	4	5	6	7	8
	c. SBS Bin Mental Kejuangan	25					
	1) Kewarganegaraan 2) Nilai-Nilai TNI 1945 3) Sapta Marga 4) Sumpah Prajurit 5) Delapan Wajib TNI		5 5 5 5 5	- - - - -	- - - - -	- - - - -	
<b>B.</b>	<b>BS Perundang-Undangan</b>	21					
	- SBS Perundang- Undangan	21					
	1) UU RI No. 3/2002 tentang Hanneg 2) UU RI No.34/2004 tentang TNI 3) Perundangan terkait tugas TNI		7 7 7	- - -	7 7 7	- - -	
<b>II.</b>	<b>Subjek Bin Pengetahuan dan Keterampilan</b>	<b>(744)</b>					
<b>A.</b>	<b>BS Militer Umum</b>	236					
	a. SBS Sejarah	14					
	1) Sejarah Perjuangan Bangsa 2) Sejarah Perjuangan TNI AD		7 7	- -	7 7	- -	
	b. SBS Kesehatan	15					
	1) Keslap/P3K 2) Pencegah IMS/HIV AIDS		5 5	5 -	- -	- -	
	c. SBS Komunikasi	10					
	- Prosedur Radio Telephone		5	5	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8
	d. SBS Permildas	120					
	1) Peraturan Baris Berbaris						
	2) Peraturan Penghormatan Militer		6	28	-	-	
	3) Peraturan Dinas Garnisun		6	19	-	-	
	4) Peraturan Urusan Dinas Dalam		8	-	-	-	
	5) Peratran Disiplin Militer		6	24	-	-	
	6) Tata Upacara Militer TNI		10	-	-	-	
	7) Seragam TNI		8	-	-	-	
	5						
	e. SBS Doktrin	8					
	- Doktrin KEP		-	-	8	-	
	f. SBS Orgas	10					
	- Pengenalan Orgas Kemhan dan TNI		-	-	10	-	
	g. SBS Psikologi	14					
	1) Komunikasi Massa		9	-	-	-	
	2) Psikologi Kelompok		5	-	-	-	
	h. SBS Administrasi	25					
	1) Penyelenggaraan Minu AD		-	-	5	-	
	2) Administrasi Personel		-	-	5	-	
	3) Komputer		-	-	5	5	
	3) Dasar-dasar Manajemen		-	-	5		



1	2	3	4	5	6	7	8
	i. SBS Kepemimpinan	20					
	1) Teori Kepemimpinan 2) Kepemimpinan TNI 3) Cara Memberikan Instruksi		- - -	- - -	5 5 5	- - 5	
<b>B.</b>	<b>BS TEKNIK DAN TAKTIK MILITER</b>	354					
	a. SBS Teknik Militer	259					
	1) Pengetahuan Jatri 2) Dasar-dasar Menembak Jatri 3) Menembak Senapan 4) Menembak Pistol 5) Lempar Granat 6) Ilmu Medan 7) Pionir 8) Teknik Tempur Dasar 9) Harcega 10) Disiplin Tempur 11) Teknik Tempur Khusus 12) Prosedur Pimpinan Pasukan 13) PKT/PKM		5 10 - - - - 14 8 12 - - - -	5 15 19 8 5 24 8 27 - - - -	- - - - - - - 5 5 10 5 5	- - 25 8 - - - 5 5 15 5 6	
	b. SBS Taktik Militer	95					
	1) Taktik Regu Senapan 2) Patroli 3) Operasi Gerilya 4) Pengetahuan OLI 5) Rupan dalam OLI		12 - - -	27 - - -	- 10 8 6 9	- 14 - - 9	
<b>C.</b>	<b>BS INTELIJEN</b>	49					
	- SBS Intelijen Teritorial	49					
	1) Pengenalan Intelijen 2) Aspek-aspek Intelter 3) Wawancara 4) Laporan Bapul 5) Peng Dasar Pengamanan		6 12 13 13 5	- - - - 5	6 6 5 5 -	- 6 8 8 -	

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>D.</b>	<b>BS HUKUM</b>	35					
	- SBS Pengetahuan Hukum	35					
	1) Hukum Disiplin Militer		9	-	-	-	
	2) Hukum Pidana Militer		9	-	-	-	
	3) Hukum Humaniter		8	-	-	-	
	4) Hukum HAM		9	-	-	-	
<b>E.</b>	<b>BS TERITORIAL</b>	20					
	- SBS Pengetahuan Teritorial	20					
	1) Pengetahuan Dasar Binter		5	-	5	-	
	2) Sikap Teritorial		5	-	5	-	
	3) Lima Kemampuan Teritorial		5	-	5	-	
	4) Kemanunggalan TNI dan Rakyat		5	-	5	-	
<b>F.</b>	<b>BS GAR OLAH YUDHA</b>	50					
	- SBS Aplikasi	50					
	- Latihan Berganda				-	50	
<b>III.</b>	<b>Subjek Bin Jasmani Militer</b>	<b>(111)</b>					
-	<b>BS Jasmani Militer</b>						
	a. SBS Kesegaran jasmani	13					
	1) Peng Penilaian Kesamaptaan Jasmani		5	-	-	-	
	2) Kesegaran Jasmani A dan B		-	4	-	4	

1	2	3	4	5	6	7	8
	b. SBS Pembinaan Postur	8					
	1) Senam Praktek 2) Senam Senapan		- -	4 4	- -	- -	
	c. SBS Ketangkasan Jasmani	90					
	1) Medan Tangkas						
	a) Kecepatan Mars b) Lintas Medan c) Penyeberangan Sungai d) <i>Mountainering</i> e) Loncat Kendaraan f) Ketahanan Mars g) Halang Rintang		- - - - - - -	4 4 8 7 4 6 6	- - - - - - -	4 4 - - - 8 4	
	2) Renang						
	a) Renang Dasar b) Renang Militer c) Renang Ponco		- - -	4 6 -	- - -	- - 9	
	3) Perkelahian Militer						
	a) Beladiri Militer b) Perkelahian Sangkur c) Lempar Pisau dan Kapak		- - -	4 4 4	- - -	- - -	
<b>IV.</b>	<b>Lain-lain</b>	<b>(38)</b>					
<b>A.</b>	<b>Kegiatan Pendidikan</b>	38					
	a. Jam Upacara b. Jam Komandan c. Jam Tradisi d. Jam Pemeriksaan e. Jam Ceramah f. Jam Cadangan		- 2 - 2 - 2	3 - 17 - - -	- 2 - 2 3 2	3 - - - - -	
<b>B.</b>	<b>Kegiatan Ekstra Kurikuler</b>		-	-	-	-	
	<b>J U M L A H</b>	<b>(1000)</b>	<b>(285)</b>	<b>(312)</b>	<b>(193)</b>	<b>(210)</b>	

Pola Penyelenggaraan Pendidikan Pertama Bintara TNI AD (Dikmaba TNI AD) dilaksanakan selama 20 minggu @ 50 JP = 1.000 JP. Dalam penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan melalui tahap pembekalan dasar keprajuritan dan tahap pembekalan dasar golongan Bintara, dengan uraian pentahapan sebagai berikut:<sup>23</sup>

1) Tahap Dasar Keprajuritan. Pembekalan yang diberikan kepada Prajurit Siswa materi sikap dan perilaku, pengetahuan dan keterampilan serta jasmani militer merupakan materi pendukung maupun materi pokok/inti/utama meliputi Pembinaan Mental, Militer Umum, Teknik dan Taktik Militer, Intelijen, Hukum serta Jasmani Militer yang diberikan sesuai korelasi mata pelajaran yang dibekalkan sehingga mengarah kepada tujuan pendidikan sebagai Bintara TNI AD.

2) Tahap Dasar Golongan Bintara. Pembekalan yang diberikan kepada Prajurit Siswa materi sikap dan perilaku, pengetahuan dan keterampilan serta jasmani militer merupakan materi pendukung maupun materi pokok/inti/utama meliputi Pembinaan Mental, Perundang Undangan, Militer Umum, Teknik dan Taktik Militer, Intelijen, Teritorial serta Jasmani Militer yang diberikan sesuai korelasi mata pelajaran yang dibekalkan sehingga mengarah kepada tujuan pendidikan sebagai Bintara TNI AD.

b. **Pola Pendidikan Pembentukan Bintara Polri Umum.** Pendidikan Pembentukan yang selanjutnya disingkat Diktuk adalah pendidikan Kepolisian yang diperuntukkan bagi warga negara Indonesia untuk diangkat menjadi anggota Polri yang diselenggarakan untuk membentuk peserta didik yang direkrut

---

<sup>23</sup>Lampiran I Keputusan Dankodiklat TNI A Nomor Kep/209/IX/2017 tanggal 20 September 2017 tentang Program Pendidikan Pertama Bintara TNI AD (Progdikmaba TNI AD).

langsung dari masyarakat untuk menjadi anggota Polri.<sup>24</sup> Pendidikan Pembentukan (Diktuk) bagi anggota Polri terdiri dari Bintara Polri Tugas Umum, Bintara Polri Perairan, Bintara Brimob Polri, Bintara Polisi Intelijen dan Bintara Polisi Udara. Dalam kajian ini fokus kepada Diktuk Bintara Polisi Umum yang lebih banyak bersentuhan langsung di lapangan dengan prajurit TNI AD.

Berdasarkan Kurikulum Pendidikan Pembentukan Bintara Polri Tugas Umum saat ini, memiliki tujuan untuk menghasilkan Bintara Polri sebagai insan bhayangkara yang memiliki sikap perilaku, pengetahuan, keterampilan tugas umum Kepolisian, didukung dengan kondisi fisik yang samapta untuk melaksanakan tugas sebagai pemelihara Kamtibmas, penegak hukum, pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat yang profesional, bermoral, modern dan unggul. Dapat dijabarkan sebagai berikut:<sup>25</sup>

NO	MATA PELAJARAN	JML JP	TAHAP			KET
			I	II	III	
1	2	3	4	5	6	7
I	PENGANTAR	26				
	A. Pengenalan lingkungan & Tradisi Lembaga Pendidikan	4	4			
	B. Pengarahan Program	6				
	1. Jam pimpinan		2			
	2. Pola kurikulum & sistem evaluasi		2			
	3. Perdupsis & pola pengasuhan		2			
	C. Tes kesehatan dan kesamaptaaan jasmani	16	8		8	

<sup>24</sup>Peraturan Kapolri Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Komponen Pendidikan untuk Pendidikan Pembentukan dan Pendidikan Pengembangan di Lingkungan Lemdik Polri.

<sup>25</sup>*Ibid.*

1	2	3	4	5	6	7
II	KELOMPOK MATA PELAJARAN					
	A. KEPERIBADIAN	110				
	1. Revolusi Mental (Perubahan <i>mind set&amp;culture set</i> Polri)	90				
	a. NAC Polri		10			
	b. Inter Personal Skill		50			
	c. Nilai-Nilai Revolusi Mental		30			
	2. Kode Etik Profesi Polri dan Tata Krama/Etika	20	20			
	B. PENGETAHUAN SOSIAL	52				
	3. Sejarah Juang Polri	10		10		
	4. Bela Negara	12		12		
	5. Kerukunan hidup umat beragama	12	12			
	6. Pelayanan Prima	10		10		
	7. Pengantar Manajemen Intelijen Media (IMM)	8		8		
	C. HUKUM	112				
	8. UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI	20	20			
	9. KUHP	26		26		
	10. KUHP	30		30		
	11. Kapita Selekta Perundang-undangan	20		20		
	12. Peraturan Pemberhentian, Disiplin, Tata cara peradilan umum bagi anggota Polri	16		16		
	D. PROFESI TEKNIS KEPOLISIAN	728				
	13. Hak Asasi Manusia dan Gender	30	10	20		
	14. FT Sabhara	130				
	a. Tupoksiran FT Sabhara			6		
	b. Pengaturan Giat Masyarakat dan Pemerintah			30		
	c. Penjagaan			30		
	d. Pengawasan			30		
	e. Patroli			34		
	15. Tindakan Pertama Tempat Kejadian Perkara;	30		30		

1	2	3	4	5	6	7
	16. Tipiring 17. Laporan Polisi dan Berita Acara 18. Dalmas 19. Bantuan SAR dan PPGD 20. Psikologi Massa dan Negosiasi 21. Fungsi Teknis Lalu Lintas 22. Fungsi Teknis Intelkam 23. Fungsi Teknis Reserse 24. Fungsi Teknis Binmas 25. Hakikat Gangguan Kamtibmas (PG/AG/GN) 26. Polmas 27. Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) dan Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) 28. Penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian; 29. Komunikasi Elektronik Polri 30. Organisasi Polri 31. Administrasi Umum Polri E. JASMANI 32. Persenjataan dan Menembak 33. Beladiri Polri 34. Peraturan Dasar Kepolisian	30 20 100 60 40 34 30 30 50 20 30 20 20 16 10 28 200 60 80 60	  10 60    20  10    10   30 30 60	30 20 90  40 34 30 30 50  30 20 20 6 10 28  30 50  	                    	                    
III	PEMBULATAN	128				
	A. Tutup Dasbharas ( <i>Out Bound</i> ) B. Latihan Teknis C. Latihan Kerja D. Pembekalan (Ceramah)	30 30 60 8	30    	   30 60 8	    	    
IV	KEGIATAN LAIN-LAIN	44				
	A. Implementasi Karakter Kebhayangkaraan dan Kepribadian Bangsa (Revolusi Mental) B. Implementasi Pendidikan Budaya Anti Korupsi (PBAK) C. Buka/Tutup Pendidikan	20 20 4	8 8 2	12 12  	  2	   
	<b>J U M L A H</b>	<b>1400</b>	<b>438</b>	<b>854</b>	<b>108</b>	

Adapun pentahapan pendidikan yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1) Pentahapan Pendidikan. Pendidikan pembentukan Bintara Polri Tugas Umum dilaksanakan selama 7 (tujuh) bulan. Dengan pola pendidikan terdiri dari 2 (dua) bulan pertama pembentukan dasar bhayangkara, kemudian 4,5 bulan untuk pembekalan profesi kepolisian dan setengah bulan terakhir untuk pembulatan yang meliputi Latihan Teknis, Latihan Kerja dan pembekalan. Adapun pentahapan yang dilakukan sebagai berikut :<sup>26</sup>

a) Tahap Pembentukan Dasar Bhayangkara. Adalah tahap penanaman nilai-nilai luhur dan karakter sebagai insan Bhayangkara yang diwujudkan dalam sikap, perilaku dan penampilan fisik sebagai pemelihara Kamtibmas, penegak hukum, pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat.

b) Tahap pembekalan profesi Kepolisian. Adalah tahap pemberian pengetahuan, keterampilan teknik dan taktik tugas umum kepolisian serta pengetahuan fungsi teknis kepolisian lainnya dalam pelaksanaan tugas sebagai Bintara Polri.

c) Tahap Pembulatan. Adalah tahap pemberian pengalaman belajar dalam bentuk latihan teknis dan latihan kerja serta ceramah pembekalan yang merupakan suatu rangkuman dari semua mata pelajaran yang telah dipelajari sebelumnya.

---

<sup>26</sup>Keputusan Kepala Lembaga Pendidikan Dan Pelatihan Polri Nomor: Kep/252/V/2017 tentang Kurikulum Pembentukan Bintara Polisi Tugas Umum.



2) Waktu Operasional Pendidikan. Waktu pendidikan adalah 7 (tujuh) bulan terdiri dari 1.400 JP @ JP = 45 menit.

- a) Tahap-I : 2 bulan = 438 JP (Dasar Bhayangkara).
- b) Tahap-II : 4,5 bulan = 854 JP (Profesi Kepolisian).
- c) Tahap-III : 0,5 bulan = 108 JP (Pembulatan).

Hal ini menjadikan peluang untuk mewujudkan suatu kurikulum pendidikan dasar integrasi antara TNI dan Polri pada tataran pendidikan Bintara, dengan pengayaan materi pelajaran yang mengakomodir penyelesaian permasalahan yang terkait dengan TNI dan Polri.

**14. Pendidikan Integrasi TNI dan Polri yang dilaksanakan selama ini.** Pendidikan merupakan pilar dalam menyiapkan sumber daya manusia yang mempunyai peran dan fungsi sangat menentukan dalam membentuk dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia agar memiliki kriteria profesional. Kemampuan personel yang mengawaki organisasi TNI dan Polri sangat ditentukan oleh kualitas keluaran hasil didik dari setiap lembaga pendidikan yang ada di jajaran TNI dan Polri. Keberadaan lembaga pendidikan memiliki peran penting dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang profesional. Oleh karena itu, pada tanggal 3 Maret 2015 telah dilakukan penandatanganan nota kesepahaman terkait pendidikan bersama antara TNI dengan Polri.<sup>27</sup> Maksud Nota Kesepahaman tersebut untuk memanfaatkan segala sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kualitas SDM TNI dan Polri. Sedangkan tujuannya adalah tercapainya peningkatan kemampuan dan soliditas personel TNI

---

<sup>27</sup><http://utamanews.com/Hukum---Keamanan/TNI-Polri-Sepakati-Pendidikan-Dasar-Integrasi-Kemitraan-Akademi-TNI-dan-Akademi-Kepolisian>

dan Polri dalam penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan visi dan misi masing-masing institusi. Beberapa penggolongan jenis pendidikan yang telah dilaksanakan antara TNI dan Polri, sebagai berikut:

- a. **Pendidikan Pertama (Dikma).**
  - Pendidikan Dasar Integrasi Kemitraan Akademi TNI dan Akademi Kepolisian.
- b. **Pendidikan Pengembangan Umum (Dikbangum).**
  - 1) Pendidikan Sesko TNI.
  - 2) Pendidikan Sesko Angkatan.
- c. **Pendidikan Pengembangan Spesialisasi (Dikbangpes).**
  - 1) Pendidikan Intelijen.
  - 2) Pendidikan Para.
- d. **Pendidikan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Dikbangiptek).**
  - 1) Pendidikan Bidang Kelautan Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut (STTAL).
  - 2) Pendidikan Kedirgantaraan di TNI AU.

TNI merupakan suatu profesi Warga Negara yang mengaktualisasikan diri dalam upaya bela negara guna mempertahankan keutuhan wilayah, kedaulatan negara, kehormatan bangsa, melindungi keselamatan rakyat, serta ikut menciptakan perdamaian abadi dan ketertiban dunia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk itu TNI dibangun dan dikembangkan secara profesional sesuai dengan kepentingan politik negara yang berdasarkan nilai-nilai dan prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional dan hukum internasional. Berdasarkan ketentuan tersebut

seorang Prajurit di samping dituntut bekerja secara profesional juga dituntut pengorbanan jiwa dan raga selama masa pengabdianya. Demikian juga halnya dengan Polri sebagai alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya Kamtibmas. Sehingga peran lembaga pendidikan menjadi sangat penting dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang profesional di bidang masing-masing. Oleh karena itu, TNI dan Polri harus memiliki soliditas dahulu, baru kemudian dapat bersinergi. Soliditas tersebut dapat berjalan baik, apabila masing-masing dapat menghilangkan ego sektoral.

## **BAB IV**

### **ANALISA**

15. **Umum.** Sepanjang perjalanan sejarah bangsa Indonesia, eksistensi TNI dan Polri bersama dengan komponen bangsa lain turut menentukan stabilitas nasional. Semangat kerjasama secara sinergi antara TNI dan Polri menjadi pemikiran sentral dalam menyikapi gejala perkembangan terkini yang berubah dinamis dan menuntut peningkatan profesionalisme masing-masing secara proporsional dalam bidang tugasnya yang dibangun melalui pendidikan agar sinergi antara keduanya. Oleh karena itu, guna memecahkan permasalahan dan mengurai permasalahan dalam kajian ini maka dilakukan analisa untuk menemukan dan mendapatkan solusi dari berbagai permasalahan dalam sinergi TNI dan Polri. Bentuk analisa yang diterapkan adalah analisis kualitatif. Analisis tersebut berdasarkan hubungan semantik antar masalah yang dikaji untuk mendapatkan makna data dalam rangka untuk menjawab masalah yang dikaji.

16. **Pola Pendidikan Pertama Bintara TNI dan Bintara Polri.** Tentara yang profesional menjadi tuntutan untuk terus ditingkatkan pada masa sekarang agar dapat melaksanakan tugas pokok secara optimal. Dalam rangka melaksanakan tugas pokok sebagaimana diamanatkan oleh perundang-undangan. TNI AD menjabarkan ke dalam 6 (enam) fungsi pada Doktrin Kartika Eka Paksi 2017 yaitu fungsi utama, fungsi organik militer, fungsi pembinaan, fungsi teknis militer umum, fungsi teknis militer khusus, dan fungsi teknis khusus. Pada fungsi pembinaan ada tiga hal penting yaitu doktrin, pendidikan dan latihan. Pembinaan pendidikan diarahkan pada pembinaan sistem pendidikan, komponen pendidikan dan penyelenggaraan pendidikan. Pendidikan Prajurit TNI AD diselenggarakan dengan menerapkan Tripola Dasar Pendidikan dan ditujukan untuk membentuk dan mengembangkan kualitas sumber daya prajurit, meliputi aspek sikap

dan perilaku, pengetahuan, dan keterampilan serta jasmani yang samapta.

Berdasarkan kepada Pola Pendidikan Pertama Bintara TNI AD (Dikmaba TNI AD) dan Pendidikan Pembentukan Bintara Polri Umum (Diktukba Polri Umum) tersebut, maka dapat diperoleh peluang untuk kegiatan pendidikan dasar Ba yang terintegrasi guna mewujudkan sinergi TNI (AD) dan Polri yaitu pada tahap dasar keprajuritan dan pembentukan dasar bhayangkara. Pada tahap dasar keprajuritan (Dasrit) Pendidikan Pertama Bintara TNI AD yang dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan dengan jumlah 597 JP, materi pelajaran yang memungkinkan untuk diintegrasikan karena memiliki korelasi/relevan dari aspek sikap perilaku diantaranya : SBS Bintel Rohani, SBS Bintel Idiologi, SBS Bintel Kejuangan dan SBS Perundang-undangan. Aspek pengetahuan dan keterampilan SBS Sejarah, SBS Permildas, dan SBS Teknik. Aspek Jasmani terdiri dari : SBS Kesegaran Jasmani dan SBS Ketangkasan Jasmani. Untuk SBS yang menjadi ciri khas dari TNI AD diberikan pada Dasrit Ba TNI AD, tetapi tidak diberikan saat melaksanakan pendidikan dasar integrasi.

Demikian juga dengan lama pendidikan pada tahap pembentukan dasar bhayangkara Polri Umum selama 2 (dua) bulan dengan jumlah 438 JP, materi pelajaran yang memungkinkan untuk diintegrasikan karena memiliki korelasi/relevan yaitu mata pelajaran Revolusi Mental, Sejarah Juang Polri, Bela Negara, Kerukunan hidup umat beragama. Untuk Bidang Jasmani terdiri dari Menembak, Bela diri Polri dan Peraturan Dasar Kepolisian (Peraturan Baris Berbaris, Peraturan Penghormatan, Tata Upacara dan PUDD). Untuk mata pelajaran yang menjadi ciri khas dari Kepolisian diberikan pada Dasbhara Polri, tetapi tidak diberikan saat melaksanakan pendidikan dasar integrasi. Hal ini dapat mengacu kepada pola pembuatan Kurdik dasar Ba yang terintegrasi guna mewujudkan sinergi TNI (AD) dan Polri, dengan tujuan pendidikan untuk membentuk Ba TNI AD dan Polri secara bersama-sama membangun semangat integrasi dalam rangka

mewujudkan semangat kebersamaan dan membangun soliditas antara TNI dan Polri.

a. **RPP pada Kurikulum Pendidikan.**

1) RPP Kurdikmaba TNI AD. Berdasarkan Kurikulum Pendidikan Pertama Bintara TNI AD Nomor 19 – A2 – DIKMABA TNI AD – 2017 dengan pengesahan Keputusan Dankodiklat TNI AD Nomor Kep/209/IX/ 2017 tanggal 20 September 2017, dapat dijabarkan distribusi JP pada RPP pada Tahap Dasar Keprajuritan (Diksarit) sebagai berikut ke dalam materi pelajaran :

NO	Mata Pelajaran	Jumlah JP	Persentase (%)	Ket
1	2	3	4	5
I.	<b>Bin Sikap dan Perilaku</b>	<b>107</b>		
	- Pembinaan Mental	81	75,7	<i>Sisanya 24,3 % di Tahap Dasgolba</i>
II.	<b>Bin Pengetahuan dan Keterampilan</b>	<b>744</b>		<i>Sisanya 45,27 % di Tahap Dasgolba</i>
	1. Militer Umum	173	23,25	
	2. Teknik dan Taktik Militer	199	26,74	
	3. Intelijen	5	0,67	
	4. Hukum	35	4,07	

1	2	3	4	5
III.	<b>Bin Jasmani Militer</b>	<b>111</b>		
	- Jasmani Militer	78	70,27	<i>Sisanya 29,73 % di Tahap Dasgolba</i>
IV.	<b>Lain-lain</b>	<b>38</b>		
	1. Kegiatan Pendidikan	26	64,42	<i>Sisanya 35,58 % di Tahap Dasgolba</i>
	<b>JUMLAH</b>	<b>597</b>		

Dari tabel di atas, bahwa distribusi JP pada Subjek Pembinaan Sikap dan Perilaku untuk mata pelajaran Pembinaan Mental sebesar 75,7 %, sisanya 24,3 % diberikan pada tahap Dasar Golongan Bintara (Dasgol). Hal ini menunjukkan bahwa mata pelajaran Pembinaan Mental diberikan pada tahap Dasrit dengan tujuan untuk membentuk Prajurit Siswa Dikmaba agar memiliki sikap dan perilaku yang mampu menghayati dan mengimplementasikan kepribadian sebagai Bintara. Sedangkan distribusi JP maksimal pada Subjek Bin Pengetahuan dan Keterampilan untuk mata pelajaran Teknik dan Taktik Militer sebesar 26,74 %. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan aspek pengetahuan dan keterampilan pada pola Dikmaba lebih menekan kemampuan dalam menerapkan teknik dan taktik militer seorang Bintara yang nantinya menjadi seorang Komandan Regu di satuan. Selanjutnya distribusi JP pada Subjek Bin Jasmani Militer sebesar 70,27 %, sedangkan sisanya 29,73 % diberikan pada tahap Dasar Golongan (Dasgol) Bintara. Hal ini berarti bahwa aspek jasmani

menjadi unsur penting pada tahap Dasrit untuk membentuk kondisi jasmani Prajurit Siswa yang samapta.

2) Kurikulum Pendidikan Pembentukan Bintara Polri Tugas Umum. Distribusi JP pada Kurdiktuk Polisi Umum pada tahap pembentukan dasar bhayangkara sebagai berikut :

No.	Mata Pelajaran	Jumlah JP	Persentase (%)
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>I.</b>	<b>Pengantar</b>	<b>18</b>	4,1
<b>II.</b>	<b>Kepribadian</b>		
	1. Revolusi Mental (Perubahan <i>mind set&amp;culture set</i> Polri)	90	20,54
	2. Kode Etik Profesi Polri dan Tata Krama/Etika	20	4,56
<b>III.</b>	<b>Pengetahuan Sosial</b>		
	- Kerukunan hidup umat beragama	12	2,73
<b>IV.</b>	<b>Hukum</b>		
	- UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI	20	4,56
<b>V.</b>	<b>Profesi Teknis Kepolisian</b>		
	1. HAM dan Gender	10	2,28
	2. Dalmas	10	2,28
	3. Bantuan SAR dan PPGD	60	13,69
	4. Hakikat Gangguan Kamtibmas (PG/AG/GN)	20	4,56
	5. Komunikasi Elektronik Polri	10	<b>2,28</b>



1	2	3	4
<b>VI.</b>	<b>Jasmani</b>		
	1. Persenjataan dan Menembak	30	6,84
	2. Beladiri Polri	30	6,84
	3. Peraturan Dasar Kepolisian	60	13,69
<b>VII.</b>	<b>Pembulatan</b>	30	6,84
<b>VIII.</b>	<b>Lain-lain</b>	18	4,10
		<b>438</b>	<b>100</b>

Dari tabel di atas, bahwa distribusi JP pada Kurdiktukba Polisi Umum minimal pada mata pelajaran komunikasi sebesar 2,28 %. Hal ini menunjukkan bahwa mata pelajaran Komunikasi merupakan materi pendukung. Sedangkan distribusi JP maksimal pada mata pelajaran Revolusi Mental sebesar 20,54 %. Hal ini berarti bahwa mata pelajaran Revolusi Mental diberikan pada tahap dasar bhayangkara dengan tujuan agar anggota Polri sebagai penggerak revolusi mental dan pelopor tertib sosial di ruang publik, harus memiliki karakter yang kuat sebagai aparat penegak hukum nantinya.

Berdasarkan hasil analisis terhadap RPP Kurdikmaba TNI AD pada tahap Dasar Keprajuritan (Dasrit) dan Kurdikba Polri Umum pada tahap Dasar Bhayangkara tersebut, maka dapat dirumuskan bahwa pembuatan Kurdik dasar integrasi Ba TNI AD dan Polri dapat dilaksanakan.

**17. Urgensi Pendidikan Dasar Ba Yang Terintegrasi Guna Mewujudkan Sinergi TNI (AD) dan Polri.** Sejak pemisahan TNI dan Polri dari ABRI, banyak terjadi permasalahan di lapangan antara anggota TNI dan Polri. Padahal TNI dan Polri bersama dengan komponen bangsa lain turut menentukan stabilitas nasional. Kondisi stabilitas nasional suatu negara sangat ditentukan oleh interelasi, interaksi dan interdependen berbagai komponen yang terkandung pada

aspek kehidupan nasional (politik, ekonomi, sosial budaya dan Hankam) yang berlangsung secara sinergis. Sehingga, pada tataran ini sinergi TNI dan Polri akan memberikan sumbangan signifikan bagi stabilitas nasional. Sepanjang perjalanan sejarah bangsa Indonesia, eksistensi TNI dan Polri bersama dengan komponen bangsa lain turut menentukan stabilitas nasional. Semangat kerjasama secara sinergi antara TNI dan Polri menjadi pemikiran sentral dalam menyikapi gejala perkembangan terkini yang berubah dinamis menuntut peningkatan profesionalisme masing-masing secara proporsional dalam bidang tugasnya agar sinergi antara keduanya mampu memelihara stabilitas nasional.

Dari data konflik TNI dan Polri selama ini, terlihat bahwa seluruh konflik terjadi di jajaran prajurit tingkat bawah. Berbagai penyelesaian permasalahan telah dilakukan, diantaranya dengan mengadakan kegiatan olah raga bersama, hiburan bersama dan kegiatan saling mengunjungi satuan-satuan TNI dan Polri, bahkan Pemerintah telah berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan prajurit dan anggota kepolisian. Namun hal tersebut belum mampu menyelesaikan akar permasalahan yang mengakibatkan konflik TNI dan Polri yang terjadi selama ini. Bahkan penyelenggaraan pendidikan integrasi yang telah dilaksanakan secara bersama antara Akademi TNI dan Akpol belum menyentuh pada tataran pendidikan tingkat bawah. Sementara konflik TNI dan POLRI yang terjadi selama ini di kalangan prajurit tingkat bawah. Dengan demikian pentingnya pendidikan dasar Ba yang terintegrasi guna mewujudkan sinergi TNI (AD) dan Polri dilaksanakan.

#### **18. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Dalam Pendidikan Dasar Ba Yang Terintegrasi Guna Mewujudkan Sinergi TNI (AD) dan Polri.**

Secara umum, keberhasilan pendidikan sangat ditentukan oleh komponen pendidikan yang tersedia dan memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan. Kurikulum sebagai salah satu komponen pendidikan merupakan faktor yang utama dalam mewujudkan tujuan

dan sasaran pendidikan. Beberapa faktor yang mempengaruhi dalam mewujudkan pendidikan integrasi Ba TNI AD dan Polri, diantaranya :

a. **Faktor Psikologis Kultural.** Pada umumnya anggota TNI (khususnya TNI AD) belum terlepas dari perasaan superioritas masa lalu sebagai saudara tua ketika Polri masih tergabung dalam ABRI. Sebaliknya, di kalangan Polri tumbuh sikap *overacting*, euforia kewenangan, arogansi, sebagai eksekutif pemisahannya dari ABRI serta diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memberikan kewenangan amat luas dalam fungsi Kamtibmas. Selanjutnya sikap kebanggaan korps yang berlebihan sehingga satu sama lain merasa lebih hebat. Sikap ini lebih meningkat lagi ketika diberlakukan pemakaian atribut yang seharusnya jadi simbol keistimewaan korps militer, seperti pemakaian baret dan pakaian loreng. Selanjutnya, masalah kecemburuan akibat perbedaan kesejahteraan. Perlu digarisbawahi bahwa perbedaan mencolok kesejahteraan ini bukan disebabkan masalah gaji, melainkan karena kalangan Polri memiliki kesempatan lebih luas mencari penghasilan tambahan seiring dimilikinya kewenangan yang amat lebar tadi. Pada sisi lain, disiplin, penegakan hukum, serta ketauladanan pimpinan pada kedua institusi amat lemah. Berbagai faktor psikologis tadi sering menjadi pemicu bentrokan di lapangan, masalah kecil seperti saling pandang atau senggolan saja bisa menimbulkan perkelahian antar korps. Sehingga dalam penyusunan kurikulum nantinya, harus dapat mewadahi materi-materi yang berkaitan dengan mata pelajaran kebersamaan.

b. **Faktor Budaya.** Kurikulum dapat dipandang sebagai suatu rancangan pendidikan. Sebagai suatu rancangan, kurikulum menentukan pelaksanaan dan hasil pendidikan. Bahwa pendidikan merupakan usaha mempersiapkan peserta

didik untuk terjun ke lapangan penugasan. Pendidikan di TNI keras, tetapi bukan untuk kekerasan. Karena itu, kekerasan yang ada dilaksanakan secara terukur dan senantiasa memperhatikan faktor keselamatan dan keamanan. Seperti pada pembinaan dan pendidikan fisik yang dilakukan, karena tanpa perlakuan yang tegas, keras, dan disiplin, para calon prajurit TNI akan banyak berdiskusi, membantah, berargumentasi, dan pada akhirnya latihan tidak akan mencapai sasaran. Pendidikan TNI memang mempersiapkan postur prajurit yang siap setiap saat menghadapi tugas berat dan berpotensi menimbulkan stres tinggi, sehingga diperlukan latihan keras. Mendidik anggota TNI dilakukan dengan keras dan tegas bertujuan untuk membentuk sosok prajurit TNI yang tanggap, tanggon, dan trengginas. Membentuk fisik dan mental yang kuat adalah materi pelajaran yang mutlak dalam pendidikan TNI. Karena itu, latihan yang keras memang harus dilaksanakan. Pendidikan di TNI dilandasi falsafah *Dwi Warna Purwa Cendekia Wusana* yang berarti mengutamakan pembentukan kepribadian dengan jiwa kejujuran yang tinggi, dilengkapi kemampuan profesi yang mantap sebagai suatu kebulatan. Sementara sasaran pendidikan yang akan dituju, dirumuskan dalam sesanti *Tri Sakti Wiratama* yang berarti integrasi dari ketiga sifat prajurit yang utama, yaitu tanggap, tanggon, dan trengginas. Untuk menjadi pasukan tempur yang profesional, semua prajurit TNI selalu digembleng melalui latihan tempur yang keras di dalam hutan belantara. Oleh karena itu, pendidikan TNI bertujuan untuk menggembleng keterampilan tempur, stamina, latihan bertahan hidup (*jungle survival*) sangat tinggi dalam rangka menghancurkan dan membunuh musuh untuk pertahanan Negara (*killed or to be killed*).

Sementara budaya dalam pendidikan Kepolisian merupakan satu implementasi pendidikan yang menitikberatkan pada demokrasi dan HAM. Oleh karena Kepolisian adalah

bagian dari sipil dan menjalankan fungsi-fungsi penegakkan hukum yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya pada Pasal 4 yang menegaskan bahwa tugas Polri harus menjunjung tinggi HAM, serta esensi dari nilai dan prinsip demokrasi. Esensi nilai dan prinsip demokrasi dan HAM telah diterapkan dalam kurikulum berbagai jenjang pendidikan di Polri, yang ditegaskan dalam pelaksanaan pendidikan tersebut adalah mengedepankan atmosfir akademik yang lebih memudahkan proses belajar mengajar. Dengan mengedepankan budaya sipil dalam pendidikan, maka Polri telah mempelajari lebih mendalam artikulasi pendidikan yang mengedepankan nilai dan prinsip demokrasi serta HAM. Polri memiliki Dewan Pendidikan dan Latihan (Wandiklat) yang bertanggung jawab menentukan dan memformulasikan kebijakan-kebijakan berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan kepolisian yang mampu membangun pengawasan dan kontrol yang lebih efektif. Sementara Kopolnas yang merepresentasikan kontrol masyarakat, juga harus lebih pro aktif melakukan pengawasan terhadap kinerja Polri, termasuk pelaksanaan pendidikan Polri. Oleh karena itu, Polisi dididik untuk melindungi warga negara dan berada cukup dekat dengan masyarakat.

19. **Implementasi Kurdik Dasar Bintara Yang Terintegrasi Guna Mewujudkan Sinergi TNI (AD) dan Polri.** Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sedemikian pesat sangat berpengaruh terhadap sistem kehidupan nasional, tidak terkecuali dalam bidang pertahanan dan keamanan. Pada hakekatnya, pendidikan memiliki peran sebagai “agen perubahan” dalam kaitannya dengan tanggung jawab untuk mempersiapkan generasi masa depan dalam menghadapi perubahan saat sekarang dan di masa mendatang. Di samping itu, pendidikan juga bertanggung jawab untuk menjadi mitra dalam dunia

nyata yang nantinya secara holistik diharapkan dapat menciptakan kehidupan kerja yang lebih berkualitas, serta berperan aktif dalam menghidupkan etika dan moralitas dalam sendi-sendi pelaksanaan tugas di lapangan. Dalam upaya peningkatan kualitas profesionalisme TNI AD, lembaga pendidikan memegang peranan yang sangat menentukan dalam membentuk fondasi awal bagi pembangunan sumber daya manusia yang mengawaki organisasi TNI AD. Untuk itulah perlunya bagi TNI AD membina dan memantapkan secara terus menerus lembaga-lembaga pendidikan di jajarannya yang memiliki peran vital dalam membentuk karakter dan profesionalisme prajurit sesuai dengan tuntutan kompetensi yang diperlukan.

Dalam pelaksanaan pengembangan kurikulum terintegrasi, maka harus mengacu pada proses pengembangan kurikulum, sehingga akan didapat alur pengembangan kurikulum terintegrasi sebagai berikut:

- a. **Perencanaan Kurikulum Terintegrasi.** “Perencanaan” bertujuan untuk mencapai seperangkat operasi yang konsisten dan terkoordinasi guna memperoleh hasil-hasil yang diinginkan. Secara mendasar, perencanaan adalah suatu proses intelektual yang melibatkan pembuatan keputusan. Proses ini menuntut predisposisi mental untuk berpikir sebelum bertindak, berbuat berdasarkan kenyataan bukan perkiraan, dan berbuat sesuatu secara teratur. Sedangkan “kurikulum” merupakan suatu rencana yang disusun untuk melancarkan proses belajar mengajar di bawah bimbingan dan tanggung jawab lembaga pendidikan serta staf pengajar yang terlibat, juga adanya kegiatan belajar yang direncanakan dan diorganisir untuk diatasi oleh para peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditentukan oleh suatu lembaga pendidikan. Selanjutnya yang dimaksud dengan pendekatan “keintegrasian” merupakan suatu sistem totalitas yang terdiri dari komponen-komponen yang saling berhubungan dan berinteraksi baik dari komponen dengan

komponen maupun antar komponen dengan keseluruhan, dalam rangka mencapai tujuan yang di tentukan sebelumnya. Hal ini, menekankan bahwa perencanaan dalam pengembangan kurikulum terintegrasi merupakan suatu keharusan yang tidak terelakkan dalam rangka menyediakan kesempatan dan kemungkinan bagi Ba TNI AD dan Polri, dengan mempertimbangkan komponen masukan, proses dan produk secara seimbang dan setaraf.

- 1) Komponen masukan. Perencanaan kurikulum pendidikan dasar Ba yang terintegrasi guna mewujudkan sinergi TNI (AD) dan Polri, dititik beratkan pada mata pelajaran yang logis, sistematis dan sinergik agar peserta didik kedua institusi profil pengetahuan yang telah ditentukan.
- 2) Komponen proses. Perencanaan kurikulum pendidikan dasar Ba yang terintegrasi guna mewujudkan sinergi TNI (AD) dan Polri, dititik beratkan pada strategi pembentukan konsep berfikir dan rencana belajar yang diarahkan pada pengembangan kemampuan aspek rasional (potensi intelektual), meliputi: pengetahuan (*knowledge*), pemahaman (*comprehention*), penerapan (*aplication*), analisa (*analysis*), sintesa (*sintesis*), evaluasi & penilaian (*evaluation and assesment*), terhadap bagian-bagian dari sistem perencanaan pendidikan terintegrasi Ba TNI AD dan Polri, diantaranya : Lemdik, Serdik, staf pengajar, metode pendidikan, mata pelajaran, dan alat pendidikan.
- 3) Komponen produk. Perencanaan kurikulum pendidikan dasar Ba yang terintegrasi guna mewujudkan sinergi TNI (AD) dan Polri, dititik beratkan pada strategi pembentukan tingkah laku. Hal ini merujuk pada peran

pendidikan sebagai “agen perubahan” yakni pencapaian pada ranah psikomotorik (*skill*) dan afektif (sikap dan nilai), sebagai salah satu tujuan pendidikan, yaitu dengan merencanakan bimbingan tentang pembentukan tingkah laku baru berupa kemampuan aktual dan potensial Ba TNI AD dan Polri.

Selanjutnya Untuk menyusun perencanaan kurikulum terintegrasi, maka harus memperhatikan bentuknya sebagai berikut:

- 1) Unit merupakan satu kesatuan dari seluruh bahan pelajaran. Faktor yang menyatukan adalah masalah-masalah yang akan diselidiki dan dipecahkan oleh peserta didik (Ba TNI AD dan Polri), yang mana segala aktivitas peserta didik harus berkaitan dengan pokok masalah tersebut. Seluruh bahan pelajaran dipergunakan untuk memecahkan masalah yang sudah/sedang terjadi dan kecenderungan persoalan yang mungkin dihadapi di masa mendatang.
- 2) Unit didasarkan pada kebutuhan peserta didik (Ba TNI AD dan Polri), baik yang bersifat pribadi maupun sosial, baik yang menyangkut fisik maupun psikis. Kebutuhan peserta didik biasanya ditentukan oleh latar belakang masyarakatnya. Dengan sistem unit ini, akan meningkatkan perkembangan sosial peserta didik dengan banyak memberikan kesempatan bekerjasama dalam tim/kelompok secara terintegrasi dalam menyikapi dan menghadapi tantangan tugas dan pekerjaan di masa depan.
- 3) Dalam unit peserta didik (Ba TNI AD dan Polri) dihadapkan pada berbagai situasi yang mengandung permasalahan yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari dan tantangan tugas yang akan datang dikaitkan



dengan pelajaran di sekolah sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik, yang terintegrasi antara kemampuan di dalam kelas, pengembangan kemampuan dan potensi yang dimiliki menghadapi tantangan pekerjaan dan tugas yang saling terhubung, agar dapat saling menguatkan, serta pemecahan masalah-masalah yang dihadapi di lingkup interkoneksi pendidikan Ba TNI AD dan Polri, yang melibatkan keterhubungan kurikulum pendidikan kedua institusi tersebut.

4) Unit mempergunakan dorongan-dorongan sewajarnya pada diri peserta didik (Ba TNI AD dan Polri) dengan melandaskan diri pada teori-teori belajar. Peserta didik diberi kesempatan melakukan berbagai kegiatan sesuai dengan minat dan potensi yang dimilikinya. Dalam merancang unit peserta didik juga harus diikutsertakan untuk menentukan pokok-pokok masalahnya, ide, dan thema tertentu yang dapat digunakan untuk melaksanakan suatu proses belajar mengajar, secara lengkap, sistematis, dan terintegrasi bagi perencanaan kurikulum pendidikan Ba TNI AD dan Polri .

b. **Pelaksanaan Kurikulum Terintegrasi.** Secara ideal hasil yang diinginkan dalam pengembangan kurikulum pendidikan integrasi TNI AD dan Polri pada tataran pendidikan pertama Bintara adalah untuk membentuk sikap dan perilaku yang terintegrasi dengan semangat kebersamaan sesuai dengan tuntutan potensi peserta didik, yang dipersiapkan untuk menghadapi tantangan tugas dan pekerjaan di masa mendatang, sesuai dengan tujuan penyelenggaraan pendidikan yang hendak dicapai secara menyeluruh dan kompleks, yakni mengembangkan potensi peserta didik (Ba TNI AD dan Polri) agar menjadi insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu/pengetahuan, cakap, kreatif,

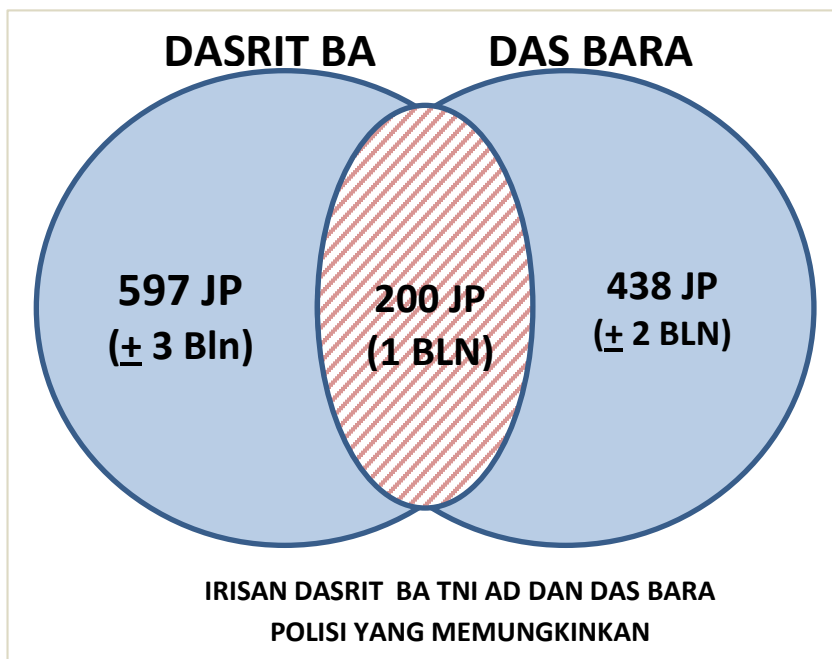
mandiri dan menjadi aparatur negara yang dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diembannya. Lebih dari itu, hal lain yang tidak bisa dilepaskan dari pelaksanaan kurikulum pendidikan dasar terintegrasi Ba TNI AD dan Polri, adalah “psikologi belajar” yakni dapat memahami dirinya dan lingkungannya, sesuai dengan tujuan kurikulum dan potensi staf pengajar dan peserta didik dalam pemecahan masalah dan menjalani tugas dan tanggung jawabnya.

- 1) Konsep Penyusunan Distribusi Jam Pelajaran (JP).
  - a) Memisahkan titik kuat mata pelajaran pada tahap dasar keprajuritan yaitu antara blok materi-materi kemiliteran dengan blok materi-materi kepolisian. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar konsentrasi proses pembelajaran lebih jelas terlihat. Pemisahan Jam Pelajaran (JP), terdiri dari Mata Pelajaran Umum (MPU), yang memuat mata pelajaran pada kedua Lemdik Ba TNI AD maupun Bintara Polri Umum dan Mata Pelajaran Khusus (MPK), berlaku khusus secara masing-masing Lemdik.
  - b) Dengan pertimbangan pembagian antara materi-materi kemiliteran dengan blok materi-materi kepolisian, maka JP yang dioperasikan saat ini perlu dibagi sesuai blok-blok tersebut. Lebih lanjut dimuat pula tentang pendistribusian Mata Pelajaran pendidikan dasar Ba yang terintegrasi wujudkan sinergi TNI (AD) dan Polri, meliputi jam pelajaran (JP) tiap hari, tiap minggu, dan selama penyelenggaraan pendidikan dasar Ba yang terintegrasi guna mewujudkan sinergi TNI AD dan Polri.

Tabel Irisan pada RPP Kurikulum Dikmaba TNI AD (Diksarit) dan  
Kurikulum Diktukba Polri Umum (Dikbhara)

No	Blok	JP	Hasil Irisan	JP	Ket
1	2	3	4	5	6
	<b>Kurdikmaba TNI AD</b>		<b>Kurdik Integrasi</b>		
I.	A. Bin Sikap dan Perilaku		I. Bin Juang & Keperibadian		
	- Pembinaan Mental	81	1. Bin Rohani	20	
			2. Bin Mental Ideologi	25	
			3. Bin Sejarah	12	
			4. Karakter Kepribadian Bangsa/Revolusi Mental	4	
II.	B. Bin Pengetahuan dan Keterampilan		II. Bin Pengetahuan dan Keterampilan		
	1. Militer Umum	173	1. Peng Teknik	20	
	2. Teknik dan Taktik Militer	199	2. Disiplin, Penghormatan & Keprotokoleran	16	
	3. Intelijen	5	3. Hukum a. Pengantar Hukum b. HAM c. UU TNI, UU Polri, UU Haneg, UU Penangan Konflik	6 6 6	
	4. Hukum	35			
III.	Bin Jasmani Militer		III. Bin Jasmani	70	
	- Jasmani Militer	78	1. Senam		
			2. Medan Tangkas a. Lintas Medan b. Kecepatan Mars c. Hanmars d. Mountainering e. Penyeberangan Sungai		
			3. Bela Diri		

1	2	3	4	5	6
IV.	Lain-lain	26			
	<b>J U M L A H</b>	<b>597</b>	IV.Lain-lain		
			1. Masa Orientasi	9	
	<b>Kurdik Ba Polri Umum</b>		2. Tes Garjas	6	
I.	Pengantar	18			
II.	Kepribadian		<b>J U M L A H</b>	<b>200</b>	
	1. Revolusi Mental (Perubahan <i>mind set&amp;culture set</i> Polri) 2. Kode Etik Profesi Polri dan Tata Krama/Etika	90  20			
III.	Pengetahuan Sosial				
	- Kerukunan hidup umat beragama	12			
IV.	Hukum				
	- UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI	20			
V.	Profesi Teknis Kepolisian				
	1. HAM dan Gender 2. Dalmas 3. Bantuan SAR dan PPGD 4. Hakikat Gangguan Kamtibmas (PG/AG/GN) 5. Komunikasi Elektronik Polri	10 10 60 20  10			
VI.	Jasmani				
	1. Persenjataan dan Menembak 2. Beladiri Polri 3. Peraturan Dasar Kepolisian	30 30 60			
VII.	Pembulatan	30			
VIII.	Lain-lain	18			
	<b>J U M L A H</b>	<b>438</b>			



Berdasarkan Tabel Irisan pada RPP Kurikulum Dikmaba TNI AD (Tahap Diksarit) dan Kurikulum Diktukba Polri Umum (Dasar Bhayangkara) tersebut diperoleh kebutuhan JP pendidikan integrasi Ba TNI AD dan POLRI adalah 200 JP @ JP = 45 menit. Sehingga berdasarkan asumsi apabila dalam operasional pendidikan tersebut dilaksanakan 50 JP per minggu, maka: Waktu Pendidikan= empat minggu x 50 JP = 200 JP (satu bulan).

Dari perhitungan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kebutuhan waktu dalam pengoperasionalan pendidikan dasar Ba terintegrasi guna mewujudkan sinergi TNI (AD) dan Polri membutuhkan waktu sekitar empat minggu atau satu bulan.

Konsep Penyusunan Materi Pelajaran. Untuk penyusunan materi disesuaikan dengan aspek penelitian Tri Pola Dasar Pendidikan yang meliputi: Aspek sikap dan

perilaku, Aspek Pengetahuan dan keterampilan, dan Aspek kesamaptaan jasmani. Sedangkan pelaksanaan kurikulum pendidikan dasar Ba yang terintegrasi guna mewujudkan sinergi TNI (AD) dan Polri, diantaranya:

1) Pembinaan aspek kejuangan dan kepribadian, yang terdiri dari : Pembinaan rohani (pengetahuan agama, toleransi antar umat beragama); Pembinaan mental idiologi (Pancasila dan UUD 45, Wawasan Nusantara, Ketahanan nasional, Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 (delapan) wajib TNI, Tri Brata & Catur prasetia, Karakter kepribadian bangsa/ revolusi mental; dan Pembinaan sejarah (Sejarah perjuangan bangsa, Sejarah TNI, Sejarah Polri).

2) Pembinaan aspek pengetahuan dan keterampilan, yang terdiri dari : Pengetahuan tehnik (Pengenalan senjata, tembak dasar, Ilmu medan Peta dan Kompas, Pionir); Disiplin, penghormatan dan protokoler (Peraturan Baris Berbaris, Peraturan penghormatan, Protokoler, Peraturan disiplin & kelembagaan, seragam kedinasan); dan Pengetahuan Hukum (Pengantar hukum, HAM, Undang-Undang TNI, Undang-Undang Polri, Undang-Undang Pertahanan Negara dan Undang-Undang penanganan konflik sosial).

3) Pembinaan jasmani, terdiri dari : Senam; Medan tangkas (Lintas medan, Kecepatan mars, Han mars, Mountenering, Penyeberangan sungai) dan bela diri dalam rangka membentuk kualitas kesamaptaan dan keterampilan jasmani Ba TNI AD dan Polri.

- 4) Lain-lain. Yaitu Masa orientasi dan Tes kesegaran jasmani.

Materi-materi tersebut di atas, dimasukkan sebagai materi pendidikan dasar integrasi Ba TNI AD dan Polri, sesuai dengan tujuan dan semangat pendidikan integratif, yaitu menyelenggarakan pendidikan Ba TNI AD dan Polri, yaitu membentuk Ba TNI AD yang menjiwai Sapta Marga, Sumpah prajurit. Serta Ba Polri yang menjiwai Tribrata dan Catur Prasetia secara bersama-sama membangun semangat integrasi (kebersamaan, kekompakan, rasa setia kawan, senasib sepenanggungan), memiliki pengetahuan dan keterampilan profesi serta memiliki kesempataan jasmani untuk dapat mengikuti pendidikan selanjutnya di Rindam dan SPN Polri. Materi-materi yang diintegrasikan diatas, diharapkan para Bintara TNI AD dan Polri dapat meningkatkan soliditas saat bertugas di lapangan, karena pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh semasa pendidikan dapat diaplikasikan saat menghadapi tugas-tugas yang mengharuskan dan / atau memungkinkan personel TNI AD dan Polri dapat bekerjasama, karena baik personel TNI AD dan Polri, sudah saling mengenal, serta tidak ragu untuk saling menolong tanpa aturan baku, yang selama ini berlaku dan mengikat institusi TNI dan Polri. Pengintegrasian yang demikian, sangatlah penting untuk segera dilaksanakan dalam rangka membangun kredibilitas dan integrasi tugas bidang pertahanan dan keamanan, yang keduanya melekat dan saling terkait guna menghadapi serta mengatasi berbagai persoalan bangsa, termasuk perselisihan yang sering melibatkan oknum anggota TNI dan Polri, yang seperti diketahui, semakin dinamis dan kompleks, dan mengganggu hubungan kerja kedua

institusi, secara dalam penanganannya membutuhkan kesiapan dan ketanggapsegeraan aparat (TNI AD dan Polri) di lapangan.

Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan dasar integrasi Ba TNI AD dan Polri tergantung dari kualitas lembaga pendidikan dan staf, serta pengajar (pertukaran pelatih) yang terlibat dalam proses penyelenggaraan pendidikan tersebut di tengah upaya mensinergikan segenap potensi dan kegiatan operasional, administrasi pendidikan serta perangkat penunjang dalam mengemban fungsi pendidikan TNI dan Polri. Strategi pembinaan pendidikan menggunakan pendekatan kesisteman sekaligus keterpaduan, dalam arti memperhatikan secara menyeluruh pelaksanaan program pendidikan yang berorientasi kepada kebutuhan yang diperlukan untuk mendukung tugas pokok kedua institusi, TNI dan Polri, baik secara mandiri maupun tugas perbantuan yang diberikan.

Oleh karena itu, dalam penyusunan materi pelajaran perlu dilakukan diskusi penyusunan materi pelajaran antara Kodiklatad selaku pengampu penyusun kurikulum pendidikan di TNI AD dan Lemdikpol selaku pengampu penyusunan kurikulum pendidikan di Polri yang dapat mengakomodir tujuan pendidikan guna membangun semangat kebersamaan, kekompakan, rasa setiakawan, senasib dan seperjuangan dalam melaksanakan tugas pokok.



## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

21. **Kesimpulan.** Berdasarkan pada hasil pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

a. Dengan menganalisa pola pendidikan pertama Bintara TNI dan Bintara Polri selama ini, maka ditemukan celah untuk penyelenggaraan pendidikan integrasi melalui pentahapan pendidikan sebagai berikut :

1) Pola pendidikan pertama Bintara TNI AD dilaksanakan selama 12 minggu @ 50 JP = 597 JP. Dalam penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan melalui Tahap Dasar Keprajuritan yang meliputi Pembinaan Mental, Militer Umum, Teknik dan Taktik Militer, Intelijen, Hukum serta Jasmani Militer yang dilaksanakan selama 8 (delapan) minggu serta Tahap Dasar Golongan Bintara yang meliputi Pembinaan Mental, Perundang Undangan, Militer Umum, Teknik dan Taktik Militer, Intelijen, Teritorial serta Jasmani Militer yang dilaksanakan selama 4 (empat) minggu.

2) Pentahapan pendidikan pembentukan Bintara Polri Tugas Umum dilaksanakan selama 10 (sepuluh) minggu (438 JP @ JP= 45 menit). Dengan pola pendidikan terdiri dari 6 (enam) minggu pertama pembentukan dasar bhayangkara, kemudian 3 (tiga) minggu untuk pembekalan profesi kepolisian dan 1 (satu) minggu terakhir untuk pembulatan yang meliputi latihan teknis, latihan kerja dan pembekalan bagi para peserta didik (Ba Polri).

b. Urgensi dari pendidikan dasar Ba yang terintegrasi guna mewujudkan sinergi TNI (AD) dan Polri akibat banyaknya konflik dan permasalahan lain (interelasi, interaksi dan interdependen) yang terjadi di lapangan antara anggota TNI dan Polri sejak dimulai pemisahan TNI dan Polri dari ABRI. Sehingga sinergi TNI dan Polri di lembaga pendidikan menjadi urgen untuk diterapkan.

c. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam mewujudkan pendidikan dasar Ba yang terintegrasi guna mewujudkan sinergi TNI (AD) dan Polri terutama dalam menyusun kurikulum pendidikan, yaitu :

- 1) Faktor Psikologis Kultural. Adanya sikap *overacting*, euforia kewenangan, arogansi, dan kebanggaan korps, kecemburuan kesejahteraan sebagai ekses pemisahannya dari ABRI serta diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memberikan kewenangan amat luas dalam fungsi Kamtibmas.

- 2) Faktor Budaya. Perbedaan budaya pendidikan militer dan polisi. Pendidikan di TNI keras yang bertujuan untuk menggembleng keterampilan tempur, stamina, latihan bertahan hidup (*jungle survival*) sangat tinggi dalam rangka menghancurkan dan membunuh musuh untuk pertahanan Negara (*killed or to be killed*). Sementara Polri mengimplementasikan pendidikan yang menitikberatkan pada demokrasi dan HAM.

d. Langkah-langkah dalam mengimplementasikan pendidikan dasar Ba yang terintegrasi guna mewujudkan sinergi TNI (AD) dan Polri diantaranya adalah :

1) Perencanaan Kurikulum Terintegrasi. Perencanaan bertujuan untuk mencapai seperangkat operasi yang konsisten dan terkoordinasi guna memperoleh hasil-hasil yang diinginkan. Proses ini menuntut predisposisi mental untuk berpikir sebelum bertindak, berbuat berdasarkan kenyataan bukan perkiraan, dan berbuat sesuatu secara teratur. Hal ini, menekankan bahwa perencanaan dalam pengembangan kurikulum terintegrasi merupakan suatu keharusan yang tidak terelakkan. Begitu juga harus mampu mengintegrasikan perencanaan dengan tujuan pendidikan di masing-masing skala, apakah skala nasional, institusional, kurikuler dan intruksional.

2) Pelaksanaan Kurikulum Terintegrasi. Secara ideal hasil yang diinginkan dalam pengembangan kurikulum pendidikan bersama TNI dan Polri pada tataran pendidikan pertama Bintara adalah untuk membentuk sikap dan perilaku yang terintegrasi dengan semangat kebersamaan sesuai dengan tuntutan potensi peserta didik. Pelaksanaan kurikulum melalui :

a) Konsep penyusunan distribusi jam pelajaran (JP), dengan memisahkan titik kuat mata pelajaran pada tahap dasar keprajuritan yaitu antara blok materi-materi kemiliteran dengan blok materi-materi kepolisian. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar konsentrasi proses pembelajaran lebih jelas terlihat. Selanjutnya dengan pertimbangan pembagian antara materi-materi kemiliteran dengan blok materi-materi kepolisian, maka JP yang dioperasikan saat ini perlu dibagi sesuai blok-blok tersebut. Dari hasil irisan RPP

Kurdikmaba TNI AD dan Kurdiktukba Polri Umum diperoleh waktu operasional pendidikan 4 minggu @ 50 JP = 200 JP.

b) Konsep penyusunan materi pelajaran, dengan penyusunan materi disesuaikan dengan aspek penilaian Tri Pola Dasar Pendidikan yang meliputi :

(1) Aspek kejuangan dan kepribadian, yang terdiri dari: Pembinaan rohani, Pembinaan mental idiologi dan Pembinaan sejarah.

(2) Aspek pengetahuan dan keterampilan, yang terdiri dari : Pengetahuan tehnik, Disiplin, penghormatan dan protokoler dan Pengetahuan Hukum

(3) Pembinaan jasmani, terdiri dari : Senam, Medan tangkas dan Bela diri.

(4) Lain-lain. Yaitu Masa orientasi dan Tes Kesegaran Jasmani.

Sehingga diperoleh personel Ba TNI AD dan Polri, yang memenuhi standar kompetensi yang telah ditentukan.

Dari beberapa kesimpulan di atas, diharapkan konflik yang terjadi antara parajurit TNI dan Polri pada tingkat bawah (Bintara dan Tamtama) dapat dihindari karena prajurit (Bintara) telah melaksanakan pendidikan dasar integrasi. Lebih lanjut, prajurit Ba TNI AD dan Polri setelah bertugas dilapangan, akan dapat saling bersinergi secara baik, dikarenakan masa kebersamaan yang

dilewati pada saat mengikuti pendidikan dasar Ba yang terintegrasi guna mewujudkan sinergi TNI (AD) dan Polri, menyebabkan mereka sudah saling kenal, dan terbiasa untuk bekerjasama, tanpa aturan baku pelaksanaan tugas kedua institusi untuk dapat saling bersinergi, menghadapi dan memecahkan persoalan tugas dan pekerjaan di lingkup kerjanya, maupun di daerah operasi.

22. **Saran.** Berdasarkan gambaran kesimpulan tersebut, dapat ditarik beberapa hal formulasi rekomendasi sebagai berikut :

- a. Perlu segera dibuat kelompok kerja gabungan TNI dan Polri yang serius dan melibatkan para sosiolog, psikolog, serta ahli terkait lain, dalam rangka membulatkan pencarian akar masalah serta merumuskan solusi yang bersifat komprehensif-permanen dalam mencari penyelesaian akar permasalahan konflik TNI dan Polri. Hal ini terkait dengan pelaksanaan pendidikan bersama yang akan dilakukan antara TNI dengan Polri pada tataran pendidikan pertama Bintara.
- b. Dalam rangka mewujudkan suatu kurikulum pendidikan dasar Ba yang terintegrasi guna mewujudkan sinergi TNI (AD) dan Polri, maka perlu duduk bersama antara Kodiklatad dan Lemdikpol guna diperoleh kesesuaian materi pelajaran yang akan diberikan.
- c. Sebelum kurikulum pendidikan dasar Ba yang terintegrasi terbentuk, perlu diaktualisasikan kebersamaan antara peserta pendidikan pertama Bintara TNI AD dengan Polri di Rindam-Rindam dan SPN-SPN saat ini melalui berbagai kegiatan bersama, seperti kegiatan olahraga, karya bakti, bakti sosial, hiburan, karya wisata, kegiatan agama, ikrar kebersamaan, permainan *team building* dan *team work* dalam kegiatan *outbond*,

bahkan kegiatan merasakan tidur di barak pendidikan TNI AD (Rindam) dan Polri (SPN) secara bergantian, sehingga dapat menjalin kedekatan emosional antara anggota TNI dengan Polri.

d. Kajian ini perlu ditindaklanjuti dengan penelitian ilmiah, sehingga dapat diperoleh suatu solusi alternatif pemecahan permasalahan pendidikan dasar Ba yang terintegrasi guna mewujudkan sinergi TNI (AD) dan Polri dalam menghadapi tantangan tugas di masa mendatang, yang dapat dimulai dari pendidikan pada tataran pendidikan pertama Bintara.

Bandung,       Maret 2018  
Komandan Seskoad,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large loop at the top and several smaller loops and strokes below it, ending in a long horizontal line.

Kurnia Dewantara  
Mayor Jenderal TNI

## DAFTAR PUSTAKA

### Aturan :

Ketetapan MPR RI Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan TNI dan Polri.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Peran Polri.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia.

Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor Perpang/51/IX/2008 Tanggal 4 September 2008 Tentang Petunjuk Administrasi Pendidikan Prajurit TNI.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Sistem Pendidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kepala Lembaga Pendidikan Polri Nomor 4 Tahun 2016 tentang Kurikulum Induk Pendidikan Polri.

Surat Keputusan Kasad Nomor Skep/383/X/2002 tanggal 31 Oktober 2002 tentang Bujukin tentang Pendidikan.

Keputusan Danjen Akademi TNI Nomor Kep/112/VI/2015 Tanggal 19 Juni 2015 Tentang Kurikulum Pendidikan Dasar Integrasi Kemitraan Taruna Akademi TNI dan Akademi Kepolisian.

Keputusan Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri Nomor :  
Kep/252/V/2017 tanggal 12 April 2016 tentang Kurikulum  
Pendidikan Pembentukan Bintara Polri Tugas Umum.

Keputusan Komandan Kodiklat TNI AD Nomor Kep/209/IX/2017 tanggal  
20 September 2017 tentang Kurikulum Pendidikan Pertama  
Bintara TNI AD (Kur Dikmaba TNI AD).

Peraturan Kapolri Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Komponen  
Pendidikan untuk Pendidikan Pembentukan dan Pendidikan  
Pengembangan di Lingkungan Lemdik Polri.

**Buku :**

Arum Widyarini, 2016, Konflik TNI-Polri Pasca Reformasi Tahun 1999-  
2015, UGM Yogyakarta.

Soerjono Soekanto, 2009, Peranan Sosiologi Suatu Pengantar, Edisi  
Baru, Rajawali Pers, Jakarta.

Dewantara, Ki Hadjar, 1954, Masalah Kebudayaan. Pertjetakan Taman  
Siswa, Jogjakarta.

Trianto, 2007, Model Pembelajaran Terpadu dalam Teori dan Praktek,  
Prestasi Pustaka, Jakarta.

Effendy, Muhadjir, 2009, Jati Diri Dan Profesi TNI, UMM Press Malang.

Albert J. Reiss Jr, 1971. The police and the public, New Haven, Yale  
University Press.

Fisher, R. V. dan Schmincke, H. U., 1984. Pyroclastic Rocks. Berlin  
Heidelberg New York Tokyo : Springer-Verlag.

Myron Weiner, 1971. *Asian Survey*, The 1971 Elections and the Indian  
Party System, University of California Press.



**Website :**

<http://news.liputan6.com/read/2138129/tni-29-anggota-yonif-134-diduga-terlibat-penyerangan-mako-brimob>

<http://www.beritasatu.com/hukum/303169-ipw-3-sebab-mengapa-polisi-dan-tni-kerap-bentrok.html>

<https://kbbi.web.id/sinergi>

<https://www.gramedia.com/products/the-7-habits-of-highly-effective-people>

<https://nasional.kompas.com/read/2014/05/21/0754454/.Nawa.Cita.9.Agenda.Prioritas.Jokowi-JK>



# **PENDIDIKAN DASAR BINTARA YANG TERINTEGRASI GUNA MEWUJUDKAN SINERGI TNI AD DAN POLRI**



**BANDUNG, MARET 2018**